

**HUBUNGAN ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU
USAHA MIKRO DI KOTA SURABAYA**

**(Studi Kasus Pada Suyitno Pelaku Usaha Mikro Tas Dompot di Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan

Oleh :

RICHA ARIANY

NIM. 145120601111007



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**HUBUNGAN ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU
USAHA MIKRO DI KOTA SURABAYA**
(Studi Kasus Pada Suyitno Pelaku Usaha Mikro Tas dan Dompot di Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Richa Ariany

NIM 145120601111007

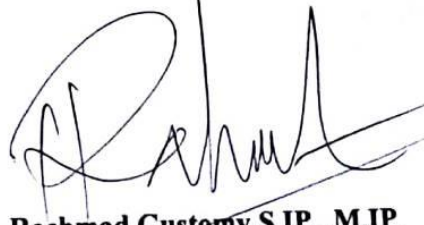
Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

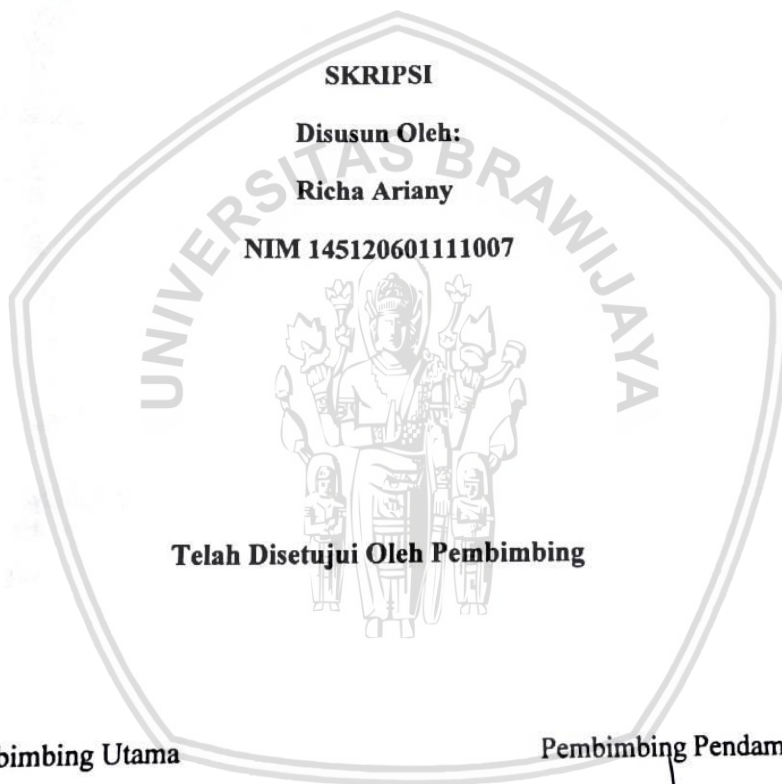
Pembimbing Pendamping



Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
NIK. 2018078912271001



Rachmad Gustomy S.IP., M.IP
NIP. 198108252015041001



Dekan Fakultas Ilmu Sosial
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BRITISIA
Prof. Dr. Umi L. Dgedge
NIP. 196908141

Prof. Dr. Umi L. Lidgdo., SE., M.Si. Ak
NIP.196908141994021001

PERNYATAAN

Nama : Richa Ariany

NIM : 145120601111007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Hubungan Antar Stakeholder dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Suyitno Pelaku Usaha Mikro Tas Dompot di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya)” adalah benar- benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam lembar Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 28 Juni 2018

Yang Memberi Pernyataan,



Richa Ariany
145120601111007

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **"Hubungan Antar Stakeholder Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya"** yang disusun peneliti, sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang peneliti laksanakan di Kota Surabaya pada tanggal 15 Februari sampai dengan 2 April 2018. Pada saat proses pembuatan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Alm. Ayahanda Arif Said yang menjadi tonggak utama bagi penulis sebagai motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan penelitian ini. Ibunda tercinta Sri Rahayu dan adik Rizkia Ramadhani yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi serta pengarahan kepada penulis.
2. Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing I penulis yang memberikan inspirasi untuk mengambil tema skripsi ini. Terima kasih atas motivasi, serta arahan selama proses penelitian hingga penulisan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis.
3. Rachmad Gustomy S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi arahan dan nasehat bagi penulis dalam perbaikan maupun penyempurnaan skripsi ini.
4. Dr.George Towar Ikbal Tawakkal,S.IP,M.Si dan Ratnaningsih Damayanti,S.IP., MecDevst sebagai dosen penguji yang telah menyempatkan hadir sebagai penguji

- yang banyak memberi masukan dan rekomendasi yang sangat bagus untuk kualitas skripsi saya agar semakin baik.
5. **Joko Purnomo, S.IP., M.A** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
 6. **Seluruh dosen serta karyawan** Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
 7. **Seluruh narasumber** yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan memberikan data yang berguna bagi skripsi penulis. Diantaranya, Ibu Jumiati, Rahma, Ike, Bapak Sigit, Yusdi, Stanislaus, Agung dan Suyitno.
 8. **Teman-teman terbaik** yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri yaitu Ignadia Pradita, Angesti Widya Palupi, Revienda Anita, Aisyah Andiani, Ika Widia Wati, Dalilah Naja, Vivi Olinda, Fitriani Susanti terimakasih rek.
 9. **Teman-teman Timika Papua** yang telah memberikan suntikan semangat kepada penulis, yaitu Vivit Widia, Aisyah Nur Fadila, Dian Tama, Fikar Lajuma, Yustika, Rizky, Sasno, dan segenap keluarga besar Timika.
 10. **Ahmad Quraisy Assegaf dan Awud Badjree** sebagai pendengar setia yang memberikan masukan, saran dan semangat selama penelitian sampai penyelesaian penulisan skripsi.
 11. **Ary Erdian** yang tak pernah bosan memberikan waktunya untuk menemani penulis, tempat berbagi suka duka, sekaligus penasehat yang sangat memahami penulis.
 12. **Teman-teman seperjuangan angkatan 2014** pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan kepada semua pihak. Kritik serta saran yang konstruktif dari berbagai pihak penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Malang, 28 Juni 2018

Penulis



LEMBAR PERSEMBAHAN

Pertama-tama dan yang selalu utama kuhanturkan beribu syukur kepada Allah SWT, Sang Maha Esa. Terimakasih atas ridhoMu sehingga saya mampu mandiri dan mencapai titik ini dalam perjalanan hidupku. Terimakasih berkat rahmat dan kasih sayangMu menjadikan saya kuat untuk menyelesaikan studi ini dengan jalan yang Engkau ridhoi.

BerkatMu pula saya memiliki kedua sosok tangguh yang sangat saya cintai, beliau adalah Mama dan Alm.Papa. Terimakasih atas kepercayaan dan tanggung jawab yang besar ini terhadap saya. Terimakasih untuk semua doa yang telah kalian panjatkan pada Dia Sang Pemilik Hidup ini. Saya tidak akan bisa pada titik ini tanpa doa restu, support dan semangat yang besar dari kalian Mama dan Papa.

Terimakasih pula karena berkatMu saya memiliki Adik yang sangat mendukung dalam melakukan hal-hal baik dalam hidup ini. Dia adalah Rizkia yang biasa ku panggil Ade Kiki, terimakasih untuk cinta dan perhatian yang luar biasa, saya seorang Kakak yang beruntung memiliki adik yang tangguh dan pejuang sepertimu. Berkat dirimu saya jadi lebih semangat untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu.

BerkatMu pula saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang istimewa, Vivit, Aisyah, Kelvin, Wody, Yoshua, Dian, Fikar, Ari, Yustika, Nur, Ode, Sasno. Kalian semangatku! Terimakasih hanya itu yang dapat kuhanturkan untuk kalian yang selalu setia dalam kondisi apapun, semua ini juga berkat doa dan dukungan kalian!

Terimakasih kepada sahabat saya sejak maba, Nanad, Epin, Diba, Pipit, Vivi, Aisyah, Fitri, Bai dan Ika. Terimakasih untuk tidak pernah bosan menegur dan memberikan nasihat juga bantuan untukku. Doaku akan selalu menyertai kalian dimana pun dan kapan pun alam akan membawa kita terpisah untuk kemudian bertemu kembali. Kalian luar biasa!

ABSTRAK

Richa Ariany, (2018). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Hubungan Antar Stakeholder Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Mikro Bidang Fashion Tas Dompot di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya). Dosen Pembimbing : Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP, M.A dan Rachmad Gustomy, S.IP, M.IP.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki minat cukup banyak dalam menjalankan jenis usaha mikro. Jenis usaha mikro yang digeluti seperti *handycraft*, *frozen food*, batik, keripik tempe, vas batik dan tas dompet. Kategori usaha mikro yang diminati cukup banyak ialah pada bidang fashion kategori tas dompet. Berdasarkan minat usaha mikro yang tinggi menggerakkan pemerintah Kota Surabaya menginisiasikan sebuah program pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dengan melibatkan beberapa Satuan Kerja Pemerintahan Daerah, salah satunya dengan memberdayakan usaha mikro melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Pada penelitian ini tujuan peneliti ialah untuk mengetahui bagaimana hubungan antar stakeholder pemberdayaan pelaku usaha mikro Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Pemberdayaan dengan fokus pada Hubungan Stakeholder Pemberdayaan (Ambar Teguh Sulistiyani, Isbandi Rukminto dan Alif) yang terdapat empat indikator, yaitu (1) Hubungan Kemitraan (2) Hubungan Pembinaan (3) Hubungan Partisipasi dan (4) Hubungan Koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar stakeholder pemberdayaan cukup baik walau masih terdapat tumpang tindih didalamnya. Pemberdayaan masih didominasi oleh Dinkop Surabaya; hubungan PT. Pelindo dan Dinkop cenderung kurang baik, karena adanya benturan kepentingan terkait perbedaan wewenang; Hubungan PT. Pelindo dengan pelaku UM mengarah pada hubungan antara atasan dan bawahan; hubungan akademisi dengan pelaku UM layaknya hubungan persaudaraan yang mengayomi.

Kata Kunci : *Stakeholder*, Pemberdayaan, Usaha Mikro.

ABSTRACT

Richa Ariany, (2018). Governance Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya. Correlation Among Stakeholder Empowerment Of Micro Business Perpetrators (Case Study on Micro Business Perpetrators in the Field Of Fashion Purse Bags in the Cooperative Official and Micro Business Surabaya City). Advisor Team: Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP, M.A and Rachman Gustomy, S.IP, M.IP.

Surabaya city is one of the city that has much enough interest in performing the kind of micro business. Types of micro businesses that cultivated such as handicraft, frozen food, batik, tempe chips, batik vases and purse bags. The category of micro business that a lot of interest is in the field of fashion purse bags category. Based on the high interest of micro business to propel the government of Surabaya city initiated a program of community empowerment of micro business perpetrators as a form of seriousness of Surabaya City Government by involving several Regional Government Work Unit, one of them is by empowering micro business through Cooperation and Micro Enterprises of Surabaya City. In this study the purpose of the research is to know how the correlation among stakeholders empowering micro business perpetrators of Surabaya. The method that used in this research is qualitative descriptive with case study approach. In this research, the researcher uses Empowerment Theory by focusing on Correlation Stakeholder Empowerment (Ambar Teguh Sulistiyani Isband Rukminto and alif that there are 4 indicators that is (1) Partnership Relationship (2) Development Relationship (3) Participation Relationship and (4) Coordination Relationship. The result of the research indicates that the correlation among stakeholder empowerment is quite good although there is still overlap in. Empowerment is still dominated by Cooperative Official Surabaya, the relationship of PT. Pelindo and Cooperatif Official tend to be less good, because of conflict of interest related to difference of authority; Correlation of PT. Pelindo with Micro Business Perpetrators leads to relationship between superiors and subordinates, academic relationships with Micro Business Perpetrators like fraternal relationships that nurture.

Keywords: Stakeholder, Empowerment, Micro Business.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Kerangka Teoritik.....	26
2.2.1 Teori Pemberdayaan.....	26
2.2.1.1 Hubungan antar Stakeholder Pemberdayaan.....	33
2.2.1.1.1 Hubungan Kemitraan.....	35
2.2.1.1.2 Hubungan Pembinaan.....	38
2.2.1.1.3 Hubungan Partisipasi.....	40
2.2.1.1.4 Hubungan Koordinasi.....	41
2.3 Alur Pikir Penelitian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	49

3.3 Fokus Penelitian.....	50
3.4 Jenis Data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5.1 Wawancara.....	52
3.5.2 Dokumentasi.....	54
3.6 Teknik Analisis Data	55
BAB IV PEMETAAN DAN PERAN STAKEHOLDER.....	58
4.1 Pemetaan Aktor.....	58
4.1.1 Pemerintah.....	60
4.1.2 Swasta.....	62
4.1.3 Masyarakat.....	63
4.2 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya.....	63
4.2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	69
4.2.2 Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	70
4.3 Peran Akademisi (Ciputra dan Airlangga) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya.....	73
4.4 Peran BUMN (PT. PELINDO) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya.....	74
4.5 Peran Perbankan (Bank Jatim) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya.....	76
4.6 Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya.....	77
4.6.1 Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Bidang Fashion Tas dan Dompet.....	77
BAB V HUBUNGAN STAKEHOLDER PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.....	79
5.1 Hubungan Stakeholder dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya.....	79
5.1.1 Hubungan Kemitraan (Permodalan).....	80
5.1.2 Hubungan Pembinaan.....	83
5.1.3 Hubungan Partisipatif.....	99
5.1.4 Hubungan Koordinasi.....	101
BAB VI PENUTUP.....	109
6.1 Kesimpulan.....	109
6.2 Rekomendasi.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Hubungan Stakeholder dalam Pemberdayaan.....	34
Bagan 2.2	Alur Pikir Penelitian	42
Bagan 4.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	Kota Surabaya	70
Bagan 5.1	Alur Prosedur Pendaftaran Produk di BPOM.....	91
Bagan 5.2	Alur Perijinan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.....	94
Bagan 5.3	Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal.....	97
Bagan 5.4	Pola Hubungan Koordinasi Pemberdayaan.....	103



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Usaha Mikro Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.....	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini.....	20
Tabel 2.2	Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	31
Tabel 3.1	Data Informan Peneliti.....	54
Tabel 4.1	Pemetaan Stakeholder Pemberdayaan.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Sorum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya.....	67
Gambar 5.1	Suasana Bimbingan Teknis.....	85
Gambar 5.2	Ramainya Partisipasi Pelaku Usaha Mikro.....	100
Gambar 5.3	Produk Usaha Mikro Tas dan Dompot.....	106



DAFTAR ISTILAH

CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> adalah kewajiban sosial swasta atau perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai dampak dari ekspansi bisnisnya yang dimungkinkan telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dimana mereka menjalankan aktivitasnya.
Bazaar	: Pasar yang sengaja diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari; pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan, dan sebagainya
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.
Dinkop	: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan Pembangunan, Pengembangan, dan Pembinaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Fasilitas Pembiayaan, dan Kelembagaan Koperasi.
Fasilitator	: Seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut.
Hubungan	: Hubungan adalah tentang bagaimana seseorang individu berhubungan dengan individu lainnya.
PKBL	: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat.
Sertifikasi Halal	: Fatwa halal MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman labelan halal dalam setiap produk makanan minuman, obat-obatan, dan kosmetika.
SDM	: Sumber Daya Manusia; individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia, sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
Sosialisasi	: Proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Stakeholder

: Kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan, serta kinerja organisasi.

UMKM

: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari usaha kerakyatan.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Peneliti
- Lampiran 2 : Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Tugas Penguji Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Tugas Perpanjangan Bimbingan
- Lampiran 5 : Surat Tugas Kompre
- Lampiran 6 : Monitoring Bimbingan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan mutu hidup di masyarakat dan pemerataan kesejahteraan warga negara. Upaya meningkatkan mutu hidup masyarakat didasari pada keterbelakangan yang nyata terjadi di negara-negara berkembang yaitu bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dijadikan sebagai prioritas utama dalam meningkatkan taraf hidup warga negara. Setiap negara yang sedang membangun harus menentukan apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan perekonomiannya. Salah satu pemecahan masalah tersebut dengan memberlakukan kebijakan perdagangan bebas.

Perdagangan bebas salah satu pilihan kebijakan yang dapat meningkatkan perekonomian negara, dengan menerapkan kebijakan perdagangan bebas berarti dapat memperbanyak pasar produk di suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era globalisasi ini banyak orang dari berbagai negara saling berinteraksi dan melakukan persaingan secara terbuka. Akibatnya, menyebabkan terjadinya perdagangan bebas.

Salah satu negara yang memberlakukan kebijakan perdagangan bebas ialah Indonesia, tujuannya guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, adanya perdagangan bebas juga dapat mengancam perekonomian domestik. Bagaimana tidak, saat produk asing masuk secara bebas berarti

mengancam produk dalam negeri, terlebih bagi para pelaku usaha mikro yang merupakan kategori terkecil dalam dunia usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan pada bidang ekonomi dengan baik mengingat usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional maka perlu dilakukan penguatan ekonomi dan upaya-upaya pemberdayaan pada para pelaku usaha mikro agar dapat bersaing di era perdagangan pasar bebas.

Usaha mikro merupakan unit terbanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2010-2013 jumlah unit usaha mikro terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 jumlah unit usaha mikro berjumlah 53.504.416 atau 99,40% lebih banyak dibandingkan dengan kategori usaha kecil, menengah dan besar. Pada tahun 2011 jumlah unit Usaha mikro mengalami kenaikan sebesar 1,97% yaitu berjumlah 54.559.969 atau 98,82%. Pada tahun 2012 jumlahnya naik menjadi 55.856.176 atau 98,79 lebih besar dibandingkan kategori usaha lain. Jumlahnya pun juga kembali naik pada tahun 2013 sebesar 2,39% yaitu 57.189.393 unit atau 98,77% lebih banyak dibandingkan kategori usaha lain.¹

Melihat dari data tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro merupakan kategori usaha yang dominan diantara kategori usaha lainnya. Berdasarkan peningkatan jumlah yang signifikan tersebut, keberadaan Usaha mikro berpotensi menjadi pilar ekonomi masyarakat Indonesia. Terlebih saat negeri ini mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 silam. Saat itu, banyak usaha

¹ <http://www.depkip.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/> diakses pada 30 Juli 2017 pukul 17.10 wib

berskala besar yang mengalami kalang kabut bahkan berhenti aktifitasnya. Namun, sektor Usaha mikro tetap bisa bertahan bahkan bisa menembus pasar yang selama ini dikuasai oleh perusahaan besar.

Dominannya kategori usaha mikro dalam dunia usaha juga dapat meraup lebih banyak tenaga kerja di Indonesia jika dibandingkan dengan usaha kecil, menengah dan besar. Menurut data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah tenaga kerja usaha mikro pada tahun 2010 sebanyak 91.729.384 atau 90,83% lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada kategori usaha kecil, menengah dan besar. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 3,52% yaitu berjumlah 94.957.797 atau 90,77%. Pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja menjadi 99.859.517 atau 90,12% lebih banyak daripada jumlah kategori usaha lain. Kenaikan jumlah tenaga kerjapun juga terjadi pada 2013 sebesar 4,77% yaitu menjadi 104.624.466 atau 88,90%.²

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tidak sedikit jumlah tenaga kerja di Indonesia yang menggeluti kategori usaha mikro, itu berarti bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kategori usaha ini. Melihat potensi Usaha mikro yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, untuk itu perlunya peran aktif pemerintah untuk melindungi dan memperjuangkan keberlanjutan sektor usaha mikro dengan memperhatikan keberlangsungan hidup para pelaku usaha mikro tersebut melalui pemberdayaan guna meningkatkan kualitas baik sumber daya

² *Ibid*

maupun produk yang dihasilkan usaha mikro, sehingga dapat terus bersaing dengan sektor usaha lainnya yang lebih besar.

Salah satu peran pemerintah untuk melindungi para pelaku usaha mikro dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat didasari atas pembangunan masyarakat yang merupakan proses pengembangan kapasitas masyarakat, dari yang awalnya memiliki keterbatasan kemudian menjadi masyarakat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini ialah para pelaku usaha mikro yang menjadi salah satu tonggak dalam perekonomian di Indonesia. Disamping itu, pemberdayaan pelaku usaha mikro menjadi penting untuk dilakukan karena akan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, menggerakkan ekonomi rakyat, mengurangi pengangguran serta mampu mendorong peningkatan kualitas hidup yang akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

Sektor usaha mikro memiliki kontribusi penting yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Kontribusi sektor Usaha mikro tersebut terbukti pada besarnya sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Pada tahun 2010 kontribusi kategori usaha mikro terhadap PDB nasional sebesar 2.011.544,2 milyar atau 33,15% dari PDB nasional. Di tahun 2011 kontribusi kategori usaha mikro terhadap PDB nasional naik sebesar 2.579.388,4 milyar atau 34,64% dari PDB nasional. Tahun 2012 mengalami kenaikan lagi menjadi 2.951.120,6 atau 35,81% dari PDB nasional dan tahun 2013 menjadi

3.326.564,8 atau 36,90% dari PDB nasional.³ Melihat begitu besar potensi yang dimiliki oleh usaha mikro terhadap PDB, sehingga mengapa sektor usaha mikro menjadi penting untuk terus dijaga keberlanjutannya dan perlu ditingkatkan melalui salah satu cara yaitu pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Peran pemerintah terhadap usaha mikro dalam pemberdayaan pun sudah direalisasikan, tidak terkecuali juga pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki pusat kegiatan perekonomian, dengan perdagangan sebagai aktivitas utamanya ialah Kota Surabaya. Kota yang terletak strategis tepat di pesisir utara Pulau Jawa, membuat Kota ini berkembang menjadi pusat perekonomian terbesar di Indonesia timur. Aktivitas perdagangan dan jasa yang menjadi denyut nadi kota memposisikan Surabaya sebagai Kota Jasa Perdagangan. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro penting untuk dilakukan mengingat posisi Kota Surabaya sebagai pusat aktivitas ekonomi yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan terpadat di Jawa Timur.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di tahun 2017 penduduk Kota Surabaya berjumlah 3.052.020 jiwa dengan rincian Laki-Laki berjumlah 1.523.956 jiwa dan Perempuan berjumlah 1.528.064 jiwa.

⁴ Dari data tersebut terlihat bahwa Kota yang berpenduduk 3 juta jiwa ini menjadi tempat persaingan yang cukup tinggi, banyaknya jumlah penduduk dari

³ *Ibid*

⁴ http://dispendukcapil.surabaya.go.id/stat_new/index.php diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 10.21 wib

berbagai daerah sedang mengadu peruntungan, akibatnya persaingan berebut peluang di Kota metropolitan ini menjadi semakin ketat. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi yang akan menyeimbangkan jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang ada, salah satunya dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dengan melibatkan beberapa Satuan Kerja Pemerintahan Daerah, salah satunya dengan memberdayakan usaha mikro melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

Berbicara soal peran, tentunya pemerintah tidaklah sendiri dalam menangani proses pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan pun tidak luput dari peran orang ketiga. Artinya bahwa, pemberdayaan dilakukan tidak hanya dari pemerintah melainkan ada pihak lain yang membantu terselenggaranya proses pemberdayaan tersebut. Pihak lain yang dimaksud adalah jaringan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan program pemberdayaan pelaku usaha mikro. Jaringan yang dibentuk terdapat aktor-aktor yang akan turut ikut serta dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro. Hal tersebut dibuktikan dengan penuturan bu Jumiati yang menjadi salah satu staf di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Menurut ibu jumiati kalau kerjasama dengan pihak lain tentu ada, seperti narasumber itu dinas mengambil dari Universitas Ciputra. Berhubung disana ada *entrepreneurship* nya, ada manajemen kewirausahaannya. Kalau fasilitasi halal dinas sendiri bekerjasama dengan MUI, kalau cuma PRT dinkop dengan dinas kesehatan, kerjasama dengan dinas kesehatan itu dinkop cuma mengambil

narasumbernya saja tapi dinkop yang presentasi ke sana juga dengan biaya pemerintah gratis. Halal pun jug mendapat gratis kalau binaan dinkop.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha mikro sendiri dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro akan dilakukan setelah pelaku usaha mikro dibina oleh bapemas, di bapemas akan diberikan pelatihan guna menghasilkan keterampilan dan dapat membuat suatu produk. Saat produk tersebut dinilai layak jual, dari sinilah Dinas Koperasi mulai mengambil beberapa dari pelaku usaha mikro tersebut untuk diajarkan cara pembukuan, manajemen, mengatur keuangan dan meningkatkan kualitas produk agar nantinya dapat bersaing di pasar. Disamping itu, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikropun turut mengikutsertakan para pelaku usaha mikro untuk berjualan jika diadakan *event* seperti bazar-bazar, festival kuliner dan pameran.⁵

Mengikutsertakan para pelaku usaha mikro dalam ajang festival kuliner atau bazar-bazar menjadi hal yang yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha mikro. Selain upaya yang diusung oleh pemerintah Kota Surabaya, *event-event* yang diselenggarakan tersebut untuk menunjukkan adanya proses pemberdayaan, peran dari sektor swastapun turut berkontribusi dalam mendorong para pelaku usaha mikro sebagai aktor masyarakat. Pelaku usaha mikro juga turut berpartisipasi memenuhi kegiatan tersebut. Usaha mikro yang didirikanpun berbeda-beda jika

⁵ *Ibid.*

dilihat berdasarkan jenis usahanya. Berikut ini jenis usaha mikro yang dalam naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya:⁶



⁶ Berdasarkan Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, 2017.

Tabel 1.1

Jenis Usaha Mikro Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

Jenis Usaha	Jumlah	Jenis Usaha	Jumlah
Keset	3	Rajungan Krispy	1
Baju <i>couple</i>	1	Sambel Pecel	1
Lukisan	1	Minuman Sari Mangga	1
Batik <i>jumput</i>	4	Jamu	1
Aksesoris	12	Keripik usus	1
Jahit	4	Baju Syari, Rukuh	1
Jahit jilbab, bros, bantal	1	Hantaran	1
Daur ulang	5	Aneka Pastry	1
Roti/Brownies bakery	2	Koveksi	1
Sulam flanel	1	Kerudung Painting	1
Kripik tempe	1	Kertas Semen	1
Jamu instan	1	Sambal Rujak	1
Sari temulawak	1	Bakso Bakar	1
Batik biasa/ batik tulis	7	Enceng Gondok	1
Telur Asin	3	Piala boneka	1
Kue Kering	6	Tas Rajut dan Sulam Pita	2
Tudung Saji, Hias Toples	1	Pernak-pernik Pernikahan	1
Saridele	2	Minuman herbal	1
Sinom, Kembang Goyang	1	<i>Bedcover</i> , sprei	2
Kue Risol, Lumpia, Tahu Njedir	1	Sambal Ikan Teri	1
<i>Cake</i> dan Coklat	1	<i>Fashion</i> dan Hijab	2
Vas Batik	1	<i>Frame</i> Foto Flanel	1
<i>Frozen Food</i>	2	<i>Cookies</i> dan camilan	1
Tas, Dompot	10	Cooklat <i>Box</i>	1
Makanan dan Minuman	5	Bakpia	1
Bordir	1	Nugget Lele	1
Susu Puding	1	<i>Handycraft</i>	9
Aneka Peyek	1	Sambal Tongkol, Daging dan Udang	1
Keripik Pisang dan Tahu Bakso	1	Kecap	1
Jumlah Pelaku Usaha Mikro	81		37
Total Pelaku usaha mikro			118
Total Jenis Usaha Mikro			58

Sumber: olahan penulis, 2017

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat jenis usaha mikro yang cukup banyak digeluti oleh para pelaku usaha mikro yaitu jenis usaha tas dan dompet, aksesoris dan handycraft. Ketiga jenis usaha tersebut adalah jenis usaha yang paling banyak digeluti oleh pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Artinya bahwa, banyak pelaku usaha mikro yang menggantungkan hidupnya pada jenis usaha ini, sehingga diperlukannya pemberdayaan yang tepat dalam pengelolaan usahanya.

Berdasarkan ketiga jenis usaha mikro tersebut, peneliti memfokuskan kepada salah satu jenis usaha saja untuk dijadikan acuan atau fokus dalam penelitian ini yakni jenis usaha Tas dan Dompet. Penulis mengambil salah satu dari jenis usaha tersebut untuk memfokuskan penelitian penulis, melihat cukup banyak pelaku usaha mikro binaan dinas koperasi, selain itu tujuan penulis memilih jenis usaha Tas dan Dompet karena didasarkan pada usaha yang cukup terkenal dann diminati oleh kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa dan bahkan Ibu Rumah Tangga.

Dalam perkembangannya usaha mikro tentunya tak lepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro saat ini adalah tingginya angka peningkatan kuantitas usaha mikro yang tidak diimbangi dengan angka peningkatan kualitas pada usaha mikro. Artinya bahwa, usaha mikro memang telah menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran, akan tetapi kurang adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan banyaknya para pelaku usaha mikro yang hanya sekedar

berkemauan membangun usaha tetapi tidak memiliki *skill* dasar seperti pengelolaan keuangan atau dari segi manajemennya.

Hal tersebut dibuktikan dengan penuturan Bu jumiati yang mengatakan bahwa salah satu kendala yang menjadi permasalahan utama para pelaku usaha mikro berasal dari para pelaku usaha itu sendiri. Salah satunya belum bisa membedakan antara modal pribadi dengan modal usaha, sebab itulah kehadiran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ialah memberikan pengarahan terkait bagaimana manajemen keuangan sesuai dengan manajemen pembukuan akuntansi dasar, dengan begitu para pelaku usaha mikro paling tidak dapat membedakan antara uang pribadi dengan uang usaha.⁷

Disamping itu, masih ada beberapa kendala lainnya yang dihadapi yaitu, penempatan pemasaran. Artinya bahwa, masih banyak pelaku usaha mikro yang hanya sebatas pemikiran ia dapat berproduksi atau menghasilkan produk tetapi tidak memikirkan bagaimana nantinya akan dipasarkan. Padahal jika seseorang bertekad untuk membuka usaha banyak hal yang harus dipikirkan seperti pemasaran, paling tidak memiliki gambaran siapa yang akan dituju sebagai sasaran penjualan, kalangan mana yang akan dituju. Untuk itu dibutuhkannya pengelolaan yang baik dengan memberdayakan para pelaku usaha mikro tersebut, karena pada dasarnya usaha mikro tidaklah berlatar belakangan seorang pengusaha atau pembisnis melainkan latar belakang orang yang tidak

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jumiati, *Op.cit.*

memiliki pekerjaan tetap, ibu rumah tangga yang notabenenya bukan pengusaha.

Berdasarkan kerjasama antar stakeholder yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat pelaksanaan program pemberdayaan pelaku usaha mikro terbantu dengan masuknya swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility). CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan agar berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar perusahaan.⁸ Dalam pelaksanaan program pemberdayaan di Kota Surabaya ada beberapa aktor yang terlibat didalamnya yaitu PT. Pelindo, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai leading sector, Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Akademisi Ciputra, Akademisi Airlangga dan Perbankan. Masing-masing dari aktor tersebut menjalankan perannya yang selanjutnya akan dijabarkan oleh peneliti dalam penelitian ini sehingga dapat terlihat bagaimana hubungan dari masing-masing aktor.

Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang telah mengkaji hal serupa mengenai pemberdayaan pelaku usaha mikro. Perbedaan tersebut yaitu *Pertama*, penelitian ini berstudi kasus pada pelaku usaha mikro tas dan dompet Kota Surabaya yang difokuskan pada satu instansi pemerintah, yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. *Kedua*, penelitian ini melihat bagaimana

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diunduh dari <http://peraturan.go.id> pada tanggal 29 April 2018

hubungan yang terjalin antar stakeholder dalam memberdayakan pelaku usaha mikro tas dan dompet pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. *Ketiga*, metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah metode penelitian studi kasus. *Keempat*, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dan hubungan antar *stakeholder* pemberdayaan. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana **Hubungan antar Stakeholder dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro** yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka peneliti berkeinginan untuk mengajukan satu pertanyaan penelitian, yaitu:

- a) Bagaimana hubungan antar stakeholder dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro tas dan dompet di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu:

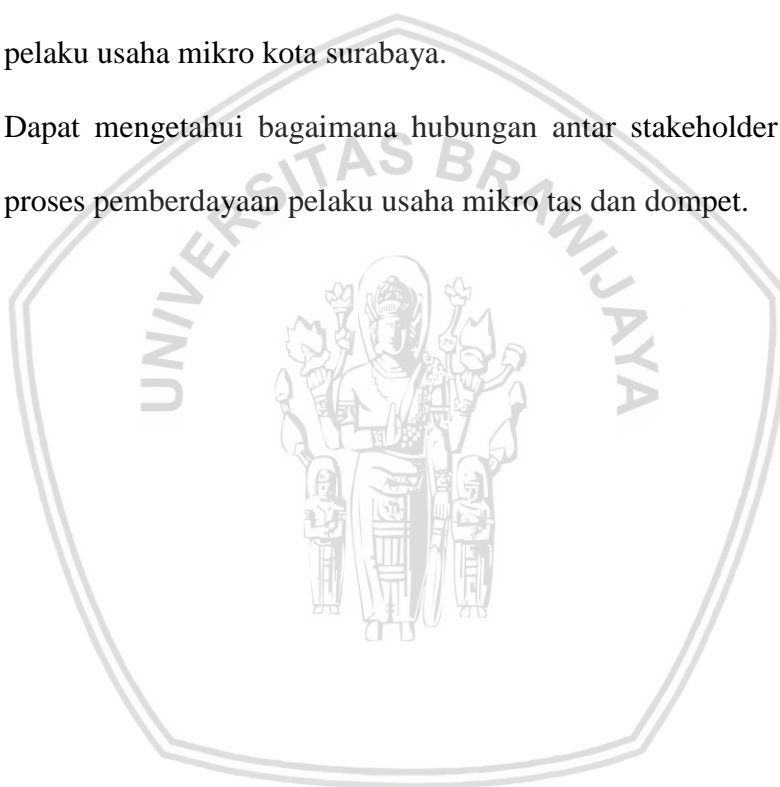
- a) Untuk mengetahui hubungan antar stakeholder dalam pemberdayaan usaha mikro tas dan dompet di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sehingga dapat diketahui sejauh mana

peran masing-masing yang terjalin dalam pemberdayaan usaha mikro tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Dapat mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kota surabaya.
- b) Dapat mengetahui bagaimana hubungan antar stakeholder dalam proses pemberdayaan pelaku usaha mikro tas dan dompet.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan tiga hal penting yang akan menjadi referensi dan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. *Pertama*, Studi Terdahulu, bagian ini berisi tentang pemaparan terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti serta untuk menerangkan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. *Kedua*, kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis peneliti dalam penelitian terkait pemberdayaan usaha mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang didasarkan pada hubungan antar stakeholder. *Ketiga*, Alur Pikir Penelitian, bagian ini berguna sebagai acuan berpikir dalam penelitian yang akan mempermudah penulis ataupun pembaca dalam memahami hasil penelitian.

1.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, ada beberapa tulisan sebelumnya yang sudah membahas berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun beberapa penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau referensi yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi Satya Rahman Perwiranto yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah di

Kota Kediri (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri)”¹, diterbitkan pada tahun 2011. Tulisan ini menjelaskan tentang usaha-usaha dan keterlibatan pemerintah daerah Kediri dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkhususkan pada dinas koperasi dan UMKM Kota Kediri. Pemberdayaan yang ingin diulas lebih dalam oleh penulis di sini ialah terkait peran pemerintah daerah Kediri yang berupaya memberdayakan dan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, peraturan walikota Nomor 72 Tahun 2008 tentang tupoksi Dinas KUMKM dan peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disamping itu, penulis juga lebih dalam membahas sejauh mana keberdayaan yang dimiliki oleh pelaku UMKM apakah telah mampu bersaing dengan usaha lain atau tidak. Kajian pustaka yang melandasi penelitian penulis adalah pemerintahan daerah, otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang pemberdayaan usaha mikro yang berstudi kasus di dinas koperasi dan usaha mikro akan tetapi penulis lebih menitikberatkan pada hubungan antar aktor dalam memberdayakan pelaku usaha mikro yang kemudia dianalisis melalui konsep *network governance* dan konsep pemberdayaan. Sedangkan penelitian yang

¹ Rahman Perwiranto, 2011, “*Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Kota Kediri (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri)*”.

dilakukan satya sama sekali tidak membahas terkait hubungan aktor dan menggunakan teori yang berbeda dengan penulis.

Kedua, skripsi Zulfa Ardaani yang berjudul “Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, kecil dan menengah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi di Kabupaten Tulung agung)”², diterbitkan pada tahun 2012. Tulisan ini menjelaskan tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulung Agung. Pemberdayaan yang dikaji oleh penulis mencakup perkuatan UMKM dengan memperbaiki melalui empat aspek yaitu, aspek permodalan, aspek pemasaran, aspek pemanfaatan teknologi dan aspek sumber daya manusia. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui klinik UMKM guna meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Tulung Agung. Disamping itu, penelitian ini juga membahas lebih dalam terkait manfaat yang akan diterima oleh masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulung Agung. Kajian pustaka yang melandasi penelitian ini adalah administrasi pembangunan, pemberdayaan, UMKM, Klinik UMKM, dan Kesejahteraan Masyarakat dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Ketiga, tesis oleh Adrianus Aman yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam *Rangka Good Local Governance* (Studi Pada Pemerintahan Kota Malang)”³,

² Zulfa Ardaani, 2012, “Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, kecil dan menengah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi di Kabupaten Tulung agung)”.

³ Adrianus Aman. 2010. “Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, kecil dan menengah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Pada Pemerintahan Kota Malang)”.

diterbitkan tahun 2010. Tulisan ini menjelaskan tentang sejauh mana implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang mengarah pada *Good Local Governance* di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan penulis ini menekankan pada instrumen kebijakan dalam mengembangkan UMKM yang mencakup instrumen kebijakan adalah instrumen regulasi, instrumen perangsang finansial, dan instrumen sukarela. Disamping itu, penulis juga mentikberatkan pada partisipasi skateholder dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM, membangun infrastruktur UMKM, dan meningkatkan sumber daya manusia UMKM di Kota Malang dalam rangka *Good Local Governance*. Dalam pengimplentasian kebijakan pengembangan usaha mikro terdapat peran pemerintah kota malang tetapi hanya sebagai fasilitator, misalnya memfasilitasi permodalan, pelatihan teknis manajemen di bidang industri dan perdagangan; fasilitasi kerjasama usaha maupun kemitraan dan fasilitasi ekspor bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori kebijakan publik dengan konsep partisipasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik, konsepsi UMKM dan konsep *Good Local Governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Keempat, jurnal penelitian oleh Suparno, Anggit Wicaksono, dan Wiwit Ariyani yang berjudul “Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pada Industri Rokok di Kudus”⁴, diterbitkan pada tahun 2013. Tulisan ini menjelaskan tentang pentingnya CSR yang seharusnya dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh perusahaan besar. Dalam tulisan ini memandang bahwa model pemberdayaan yang tepat bagi UMKM adalah model kemitraan dengan kebijakan berupa perlunya fasilitas bantuan modal dengan bunga ringan dan dilakukan sendiri oleh perusahaan besar tanpa melibatkan pemerintah ataupun LSM. Teori yang digunakan adalah teori skateholder dan teori pemberdayaan dengan metode penelitian yuridis sosiologis.

Kelima, skripsi Muhammad Farid Said yang berjudul “Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)”⁵, diterbitkan pada tahun 2015. Tulisan ini menganalisis strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh Dinas KOPERINDAG di Kabupaten Maros yang dapat dilihat melalui tiga fase yakni fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Fase inisial berasal dari pemerintah oleh pemerintah dan diperuntukkan untuk rakyat. Fase partisipatoris adalah proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukkan bagi masyarakat, sementara itu fase emansipatoris adalah proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama

⁴ Suparno, Anggit dan Wiwit. 2013. “*Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok di Kudus*”. Diunduh dari <http://jurnal.umk.ac.id> pada tanggal 08 September 2017 Pukul 11.35 WIB

⁵ Muhammad Farid Said. “*Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)*”. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015. Diunduh dari <http://repository.unhas.ac.id> pada tanggal 08 September 2017 pukul 11.41 WIB

masyarakat. Kajian pustaka yang digunakan oleh penulis ialah konsep pemberdayaan dan konsep strategi dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan sejumlah penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan. penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar memaparkan tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan UMKM, implementasi kebijakan dan keterkaitan antara UMKM dengan MEA 2015. Perlu diperhatikan bahwa penelitian penulis ini mengandung hal baru karena dengan pemikiran yang berbeda, yaitu membahas hubungan aktor di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro berdasarkan pendekatan Teori Pemberdayaan. Berdasarkan beberapa deskripsi penjelasan di atas merupakan penelitian terdahulu secara singkat dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini

No	Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Satya Rahman Perwiranto, skripsi (2011) <i>“Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Kota Kediri (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri)”</i>	Tulisan ini menjelaskan tentang usaha-usaha dan keterlibatan pemerintah daerah Kediri dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkhususkan pada dinas koperasi dan UMKM Kota Kediri. Pemberdayaan yang ingin diulas lebih dalam oleh penulis di sini ialah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian satya menjelaskan terkait usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kediri dalam pemberdayaan UMKM di dinas koperasi dan usaha mikro. 2. Analisis dilakukan dengan teori otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. 3. Sedangkan penulis sekarang berfokus pada hubungan

		<p>terkait peran pemerintah daerah kediri yang berupaya memberdayakan dan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, peraturan walikota Nomor 72 Tahun 2008 tentang tupoksi Dinas KUMKM dan peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disamping itu, penulis juga lebih dalam membahas sejauh mana keberdayaan yang dimiliki oleh pelaku UMKM apakah telah mampu bersaing dengan usaha lain atau tidak. Kajian pustaka yang melandasi penelitian penulis adalah pemerintahan daerah, otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang pemberdayaan usaha mikro yang berstudi kasus di dinas koperasi dan usaha mikro akan tetapi penulis lebih</p>	<p>Aktor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kota Surabaya yang lebih dikerucutkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya dengan menggunakan Teori Pemberdayaan sebagai pisau analisis.</p>
--	--	---	---

		<p>menitikberatkan pada hubungan antar aktor dalam memberdayakan pelaku usaha mikro yang kemudian dianalisis melalui konsep <i>network governance</i> dan konsep pemberdayaan.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan satya sama sekali tidak membahas terkait relasi aktor dan menggunakan teori yang berbeda dengan penulis.</p>	
2	<p>Zulfa Ardaani, skripsi (2012) <i>"Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, kecil dan menengah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi di Kabupaten Tulung agung)"</i></p>	<p>Tulisan ini menjelaskan tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulung Agung. Pemberdayaan yang dikaji oleh penulis mencakup perkuatan UMKM dengan memperbaiki melalui empat aspek yaitu, aspek permodalan, aspek pemasaran, aspek pemanfaatan teknologi dan aspek sumber daya manusia. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui klinik UMKM guna meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Tulung Agung. Disamping itu, penelitian ini juga membahas lebih dalam terkait manfaat yang akan diterima oleh masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis sebelumnya memaparkan tentang pemberdayaan yang memperkuat UMKM dengan memperbaiki empat aspek yaitu, aspek permodalan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan sumber daya manusia. 2. Analisisnya menggunakan teori administrasi pembangunan, UMKM, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Sedangkan penulis sekarang berfokus pada hubungan Aktor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kota Surabaya yang lebih dikerucutkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya dengan menggunakan Teori Pemberdayaan sebagai pisau analisis penelitian ini.

		di Kabupaten Tulung Agung. Kajian pustaka yang melandasi penelitian ini adalah administrasi pembangunan, pemberdayaan, UMKM, Klinik UMKM, dan Kesejahteraan Masyarakat dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	
3	Adrianus Aman, tesis (2010) <i>"Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Good Local Governance (Studi Pada Pemerintahan Kota Malang)"</i>	Tulisan ini menjelaskan tentang sejauh mana implmentasi kebijakan pengembangan UMKM yang mengarah pada <i>Good Local Governance</i> di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan penulis ini menekankan pada instrumen kebijakan dalam mengembangkan UMKM yang mencakup instrumen kebijakan adalah instrumen regulasi, instrumen perangsang finansial, dan instrumen sukarela. Disamping itu, penulis juga mentikberatkan pada partisipasi skateholder dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM, membangun infrastruktur UMKM, dan meningkatkan sumber daya manusia UMKM di Kota Malang dalam rangka <i>Good Local Governance</i> . Dalam pengimplentasian kebijakan pengembangan usaha mikro terdapat peran pemerintah kota malang tetapi hanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis sebelumnya memaparkan implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang berlangsung di Kota Malang, dimana penelitian tersebut melihat melalui tiga instrumen kebijakan yaitu, instrumen regulasi, perangsang finansial dan intrumen sukarela. 2. Teori yang digunakan penulis adalah kebijakan publik, partisipasi masyarakat dan <i>Good Local Governance</i>. 3. Sedangkan penulis sekarang berfokus pada hubungan Aktor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kota Surabaya yang lebih dikerucutkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya dengan menggunakan Teori Pemberdayaan sebagai pisau analisis penelitian ini.

		<p>sebagai fasilitator, misalnya memfasilitasi permodalan, pelatihan teknis manajemen di bidang industri dan perdagangan; fasilitasi kerjasama usaha maupun kemitraan dan fasilitasi ekspor bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori kebijakan publik dengan konsep partisipasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik, konsepsi UMKM dan konsep <i>Good Local Governance</i>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>	
4	<p>Suparno, Anggit Wicaksono, dan Wiwit Ariyani, jurnal penelitian (2013) "<i>Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok di Kudus</i>"</p>	<p>Tulisan ini menjelaskan tentang pentingnya CSR yang seharusnya dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh perusahaan besar. Dalam tulisan ini memandang bahwa model pemberdayaan yang tepat bagi UMKM adalah model kemitraan dengan kebijakan berupa perlunya fasilitas bantuan modal dengan bunga ringan dan dilakukan sendiri oleh perusahaan besar tanpa melibatkan pemerintah ataupun LSM. Teori yang digunakan adalah teori <i>skateholder</i> dan teori pemberdayaan dengan metode penelitian yuridis sosiologis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis sebelumnya menjelaskan terkait program CSR yang digunakan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro yang tanpa melibatkan pemerintah ataupun LSM. 2. Teori yang digunakan adalah teori <i>skateholder</i> dan teori pemberdayaan. 3. Sedangkan penulis sekarang berfokus pada hubungan Aktor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kota Surabaya yang lebih dikerucutkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya dengan menggunakan Teori Pemberdayaan sebagai pisau analisis penelitian ini.

5	Muhammad Farid Said, skripsi (2015) <i>"Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)"</i>	Tulisan ini menganalisis strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh Dinas KOPERINDAG di Kabupaten Maros yang dapat dilihat melalui tiga fase yakni fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Fase inisial berasal dari pemerintah oleh pemerintah dan diperuntukkan untuk rakyat. Fase partisipatoris adalah proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukkan bagi masyarakat, sementara itu fase emansipatoris adalah proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Kajian pustaka yang digunakan oleh penulis ialah konsep pemberdayaan dan konsep strategi dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis sebelumnya menjelaskan tentang strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Maros. 2. Teori yang digunakan konsep pemberdayaan dan konsep strategi. 3. Sedangkan penulis sekarang berfokus pada hubungan Aktor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kota Surabaya yang lebih dikerucutkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya dengan menggunakan Teori Pemberdayaan sebagai pisau analisis penelitian ini.
---	---	---	---

Sumber: hasil olahan penulis dari berbagai sumber, 2017

2.2 Kerangka Teoritik

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan beberapa kerangka teori yang berkenaan dengan judul yang dipilih. Kerangka teori ini nantinya dapat menjadi acuan dasar penulis dalam menelisik lebih jauh penelitian.

2.2.1 Teori Pemberdayaan

Memahami teori pemberdayaan masyarakat perlu mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk mendapatkan daya, kekuatan atau kemampuan dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Proses yang dimaksudkan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap dan kronologis sistematis yang menunjukkan adanya tahap-tahap dalam upaya pemerintah untuk mengarahkan masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Daya sendiri dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat agar mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri. Sementara itu, pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap

yang harus dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.⁶

Adapun pemberdayaan yang menuntut *good governance* didefinisikan sebagai warga negara yang berkepentingan terhadap korupsi dan kelemahan *governance* lainnya melalui kegiatan yang mencakup akses informasi terkait hak layanan dan standar yang ditentukan oleh undang-undang, memberikan pendapat mengenai perancangan dan pelaksanaan program layanan, memberikan mekanisme penangan keluhan dan warga negara yang memiliki akses untuk menuntut pertanggungjawaban dari penyedia layanan misalnya pemantauan pihak ketiga, ruang publik, audit sosial, dan sebagainya. Semua kegiatan yang melibatkan warga secara kolektif disebut sebagai tindakan permintaan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas sosial.⁷

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan banyak para pakar ahli yang mengemukakan mengenai pemberdayaan salah satunya yaitu Payne yang memaparkan bahwa pemberdayaan ditujukan guna membantu seseorang memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berhubungan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek

⁶ Ambar Teguh Sulistiyani. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm 77-79

⁷ Vinay Bhargava. 2012. “*Strategies for Empowering Communities to Demand Good Governance and Seek Increased Effectiveness of Public Service Delivery*”. Diunduh dari <https://ptfund.org> pada tanggal 24 desember 2017 pukul 21.22 WIB

hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.⁸

Melihat berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, komunitas, atau kelompok berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka sendiri. Hal tersebut selaras dengan gambaran yang diberikan oleh Shardlow yang menggambarkan bahwa pemberdayaan pada intinya mendorong seseorang untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga seseorang mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.⁹

Pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaanya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Apabila pemberdayaan sebagai suatu program maka dapat dilihat melalui tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Seperti, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam hal ini pelaku usaha

⁸ Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 78

⁹ *Ibid.* Hlm 78

mikro Kota Surabaya dalam jangka waktu kurang lebih sekitar satu sampai dengan lima tahun. Akibat dari hal tersebut, jika program telah selesai maka dianggap pemberdayaan telah selesai dilakukan.

10

Berbeda hal apabila pemberdayaan sebagai suatu proses, pemberdayaan menjadi proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang, untuk melihat apa yang dimaksud dengan pemberdayaan sebagai *on going process*, seperti yang dikemukakan oleh Rotter, Selignan, Hopson dan Scally yang melihat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang hidup manusia yang didapat dari penguasaan individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada satu masa saja sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.¹¹

Pemberdayaan adalah intrisik yang memiliki instrumental. Pemberdayaan relevan pada tingkat individu dan kolektif dan dapat bersifat ekonomi, sosial atau politik. Istilah ini digunakan untuk mengkarakterisasi hubungan di dalam rumah tangga atau antara orang miskin dan aktor lainnya di tingkat global. Dalam pengertiannya yang paling luas, pemberdayaan adalah perluasan

¹⁰ *Ibid.* Hlm 84

¹¹ *Ibid.* Hlm 84

kebebasan memilih dan bertindak. Artinya ini meningkatkan otoritas dan kontrol atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Dengan kata lain pemberdayaan adalah perluasan aset dan kemampuan orang yang tidak berdaya untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengendalikan dan meminta pertanggungjawaban institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹²

Keberadaan pandangan yang melihat pemberdayaan sebagai suatu program dan suatu proses di atas memberikan sumbangan tersendiri terhadap pemahaman tentang pemberdayaan, khususnya yang berkaitan dengan diskursus komunitas.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tidak berdaya, agar dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Untuk menciptakan *good governance* di suatu negara harusnya mampu mendekatkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berarti tanggungjawab bersama antara

¹² “*Empowerment Definition*”. Diunduh dari <http://siteresources.worldbank.org> pada tanggal 21 Maret 2018

pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang.¹³

Dalam memberdayakan masyarakat pelaku usaha mikro perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbentuk model kerjasama yang diharapkan. Rancangan peran ketiga aktor terlihat pada tabel dibawah ini.¹⁴

Tabel 2.2

Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan policy, Implementasi monitoring dan evaluasi mediasi.	Kebijakan: Politik, umum, khusus/departemental/ sektoral penganggaran, juknis dan juklas, penetapan indikator keberhasilan peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, network, sistem manajemen informasi, edukasi.
Swasta	Kontribusi pada formulasi, impleementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/policy action implementasi, donatur, private investment pemeliharaan.	dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil.
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi,	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah

¹³ Ambar Teguh Sulistiyani. *Op, Cit..* Hlm 93-94

¹⁴ *Ibid.* Hlm 97

	monitoring dan evaluasi.	action, dana swadaya menjadi objek, partisipan, pelaku utama/subjek menghidupkan fungsi social control.	terdidik dan setengah terlatih.
--	--------------------------	---	---------------------------------

Sumber: Ambar Teguh Sulistiyani (2017 : 97)

Mengingat bentuk pemberdayaan pemerintah sebagaimana tersebut maka fasilitasi yang diberikan pemerintah berupa fasilitasi kebijakan, tenaga terampil, tenaga ahli dan pendanaan. Fasilitasi pendanaan biasanya berupa investasi publik, penyediaan sistem informasi yang baik, dan program edukasi masyarakat yang tepat. Sementara swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah atau policy action bersama masyarakat. Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Adapun peran masyarakat itu yaitu memberikan bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tinggi rendahnya partisipasi tergantung pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan publik. Peran lain masyarakat adalah pendanaan, pada setiap penyelenggaraan pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat biasanya

¹⁵ *Ibid.* Hlm 98-99

mempertanyakan bagaimana kondisi masyarakat potensi masyarakat yang akan diintervensi oleh sebuah kebijakan. Pengerahan dana masyarakat sering terjadi untuk pembangunan yang dilakukan, dana tersebut dikenal dengan sebutan swadaya masyarakat.¹⁶

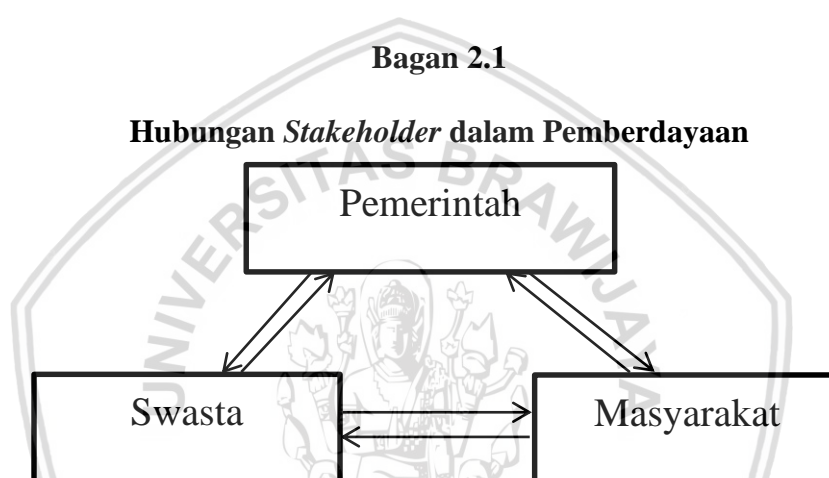
2.2.3.1 Hubungan antar Stakeholder Pemberdayaan

Pada saat mendengar kata pemberdayaan selalu akan dihadapkan dengan fenomena ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima, usaha kecil dan petani kecil umumnya adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Berangkat dari fenomena ketidakberdayaan tersebut sehingga adanya tindakan pemberdayaan, seperti program pemberdayaan yang berkelanjutan pada institusi tertentu. Munculnya tindakan pemberdayaan pelaku usaha mikro juga diimbangi dengan sumber daya manusia yang akan mengelolanya atau memberdayakannya.

Program pemberdayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, tidak terlepas dari persoalan keterbatasan sumber daya dan kognitif manusia dalam menyelesaikan masalah atau urusan publik tertentu. Dengan demikian organisasi atau institusi melakukan interaksi melalui

¹⁶ *Ibid.*

jaringan kerjasama dengan pihak lain agar mudah memperoleh informasi agar tercapainya tujuan institusi sekaligus tujuan bersama.



Sumber: Olahan Penulis 2017

Masing-masing dari ketiga aktor tersebut mempunyai peran, tugas atau fungsinya dalam jaringan kerjasama. Apabila salah satu aktor tersebut tidak menjalankan peran, tugas atau fungsinya dengan baik maka jaringan di dalamnya juga tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam Pemberdayaan Masyarakat, disebutkan paling tidak ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing dalam menjalin hubungannya, yaitu *state* (Negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat).

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya pada dasarnya tak lepas dari pihak ketiga. Dengan adanya pihak ketiga inilah pemberdayaan yang dibentuk tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan dengan bantuan pihak ketiga tersebut. Bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk mengoptimalkan pemberdayaan itu sendiri. Disamping itu, dengan pihak ketiga hubungan pemerintah pun semakin luas dan peluang usaha mikro untuk menuju berdaya semakin besar. Bentuk hubungan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistiyani, Isbandi Rukminto dan Alif yaitu hubungan kemitraan, hubungan pembinaan, hubungan partisipasi dan hubungan koordinasi.

2.2.3.1.1 Hubungan Kemitraan (Permodalan)

Kemitraan apabila dilihat secara etimologis diadaptasi dari kata *partnership* yang berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diartikan sebagai pasangan atau sekutu. Sedangkan *partnership* diartikan sebagai persekutuan atau persekongsi. Bertolak dari hal tersebut maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu

sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun syarat terbentuknya kemitraan sebagai berikut:¹⁷

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Dalam perjalanan sejarah pembangunan dilakukan oleh pemerintah secara *single fighter* dan masyarakat berposisi sebagai obyek penerima yang harus mau diintervensi, tanpa diberi ruang untuk berpendapat dan mengelola sendiri. Belajar dari pengalaman pahit akan kegagalan tersebut pada tingkat grass roots maka muncullah ide kemitraan. Membangun kemitraan hendaknya mempertimbangkan aspek kemampuan pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kemitraan tersebut, karena membangun kemitraan yang serampangan justru dapat memunculkan ketimpangan dan ketergantungan.¹⁸

Tujuan dari membangun hubungan kerjasama tentu karena untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Sehingga dengan hal tersebut kerjasama seharusnya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang ikut dalam kerjasama bukan sebaliknya yaitu ada pihak yang dirugikan atau saling merugikan. Untuk itu memerlukan komitmen

¹⁷ *Ibid.* Hlm 129

¹⁸ *Ibid.* Hlm 124

yang seimbang antara satu dengan yang lainnya agar terjadinya sebuah hubungan kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan.¹⁹

Pemberdayaan berdasarkan kemitraan ini memiliki hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam *good governance*. Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator atau katalisator sedangkan untuk tugas pembangunan menjadi tanggungjawab seluruh komponen Negara termasuk dunia usaha dan masyarakat. bentuk ideal hubungan yang ingin diwujudkan adalah kemitraan antara pemerintah, swasta, masyarakat, organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi dan LSM.²⁰

Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator yang mengarahkan masyarakat sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dan swasta untuk membuat perjanjian kerjasama agar masyarakat mendapatkan bantuan permodalan usahanya. Pemerintah memiliki hubungan fasilitator dalam menjembatani kedua belah pihak yaitu masyarakat pelaku usaha mikro dan swasta yang akan dimitrakan. Hubungan fasilitator ini lebih berfungsi untuk membuat agar kelompok sasaran menjadi lebih pandai sehingga nantinya dapat mengembangkan kelompok mereka sendiri bila sudah tiba masanya program selesai.

¹⁹ *Ibid.* Hlm 130

²⁰ *Ibid.* Hlm 76

Pemberdayaan sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar lebih pandai dan dapat mengembangkan komunikasi antarmereka sehingga akan adanya saling diskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, apabila lembaga donor berasal dari luar baik itu lembaga pemerintah maupun nonpemerintah menyelesaikan programnya, pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tersebut.²¹

2.2.3.1.2 Hubungan Pembinaan

Dalam pemberdayaan usaha mikro, proses membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat membutuhkan pembinaan yang tepat antara pemerintah, masyarakat dan pihak diluar pemerintah.²² Dalam konteks ini pihak diluar pemerintah apapun nama dan statusnya disebut jaringan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro. Karena pemerintah bekerja sendirian sehingga mengapa pihak nonpemerintah diposisikan sebagai salah satu *stakeholders* yang pada level dalam mengedukasi masyarakat.

Memberikan edukasi akan pentingnya pengetahuan manajemen, kewirausahaan, risiko dan etika bisnis akan membuat wawasan masyarakat lebih terbuka dan termotivasi untuk terus

²¹ Isbandi Rukminto. *Op, Cit.* Hlm 87

²² Ambar Teguh Sulistyani. *Op. Cit.* Hlm 127

mengembangkan usahanya dengan melihat dan memanfaatkan peluangnya dalam menjalani usaha saat ini.

Memajukan sebuah usaha sekalipun pada level paling bawah yaitu usaha mikro dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni melalui seminar atau pelatihan kewirausahaan yang tepat dapat menjadi salah satu alternatif guna meningkatkan soft skill para pelaku usaha mikro, tidak hanya untuk pelaku usaha mikro namun juga pengusaha yang baru mau membangun bisnisnya.

Dengan mengikuti pembinaan ataupun pelatihan sebelum memulai usaha, para pelaku usaha mempunyai pengetahuan yang cukup agar dapat menjalankan usahanya sehingga dapat bekerja secara maksimal tanpa merasa kebingungan tentang langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan dapat memaksimalkan waktu yang ada. Adanya pelatihan juga untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaan yang sedang atau akan dihadapi, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien bahkan mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru bagi usahanya.

Salah satu keterlibatan pemerintah dalam proses penyadaran masyarakat untuk mendorong masyarakat agar beralih dari kondisi yang ada saat ini. Peran pemerintah dalam hal ini pada hubungan yang dijalin dengan pihak luar atau nonpemerintah untuk kemudian bersama-sama mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki daya dengan membangkitkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Hal ini

bertujuan membantu pemerintah agar dapat membangkitkan kesadaran masyarakat agar dapat menerima dan berinteraksi dengan pihak luar sehingga akan terjalinnya hubungan satu dan lainnya. Upaya agar masyarakat mau dan mampu keluar dari “ketidakberuntungan struktural” mereka maka masyarakat harus mau menjalin hubungan antara satu dengan lainnya. Hal tersebutlah yang menjadi awal dari penyadaran masyarakat.²³

2.2.3.1.3 Hubungan Partisipasi

Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tak terlepas dalam pemberdayaan masyarakat. menurut Chambers partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri terkait alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih. Chambers menggambarkan bahwa “pelaku perubahan” berpartisipasi dalam usaha “masyarakat” sehingga terjadi apa yang disebut dengan proses pemberdayaan masyarakat.²⁴

Partisipasi tidak sekedar dilihat dari seseorang yang apabila terlibat dalam kegiatan fisik, seperti menghadiri penyuluhan. Esensi

²³ Isbandi Rukminto. *Op, Cit.* Hlm 97

²⁴ *Ibid.* Hlm 109

yang terkandung dalam partisipasi tidak sesempit itu. Apabila ada inisiatif atau saran dari masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu wujud partisipasi. ²⁵Dengan begitu, konsep partisipasi tidak dapat sekedar dimaknai sebagai keterlibatan yang bersifat material.

2.2.3.1.4 Hubungan Koordinasi

Dalam membangun pemberdayaan yang baik maka hubungan antar lembaga mempunyai peran yang penting. Untuk menjalankan program pemberdayaan dan penguatan hubungan melalui kerjasama dan koordinasi agar terwujudnya pelaksanaa, pengawasan hingga dengan pelaporan yang baik. Dalam melaksanakan pemberdayaan hendaknya ada koordinasi antara lembaga satu dengan lembaga lainnya agar tidak terjadinya ketimpangan informasi dan komunakasi dalam program pemberdayaan yang sedang dijalankan.

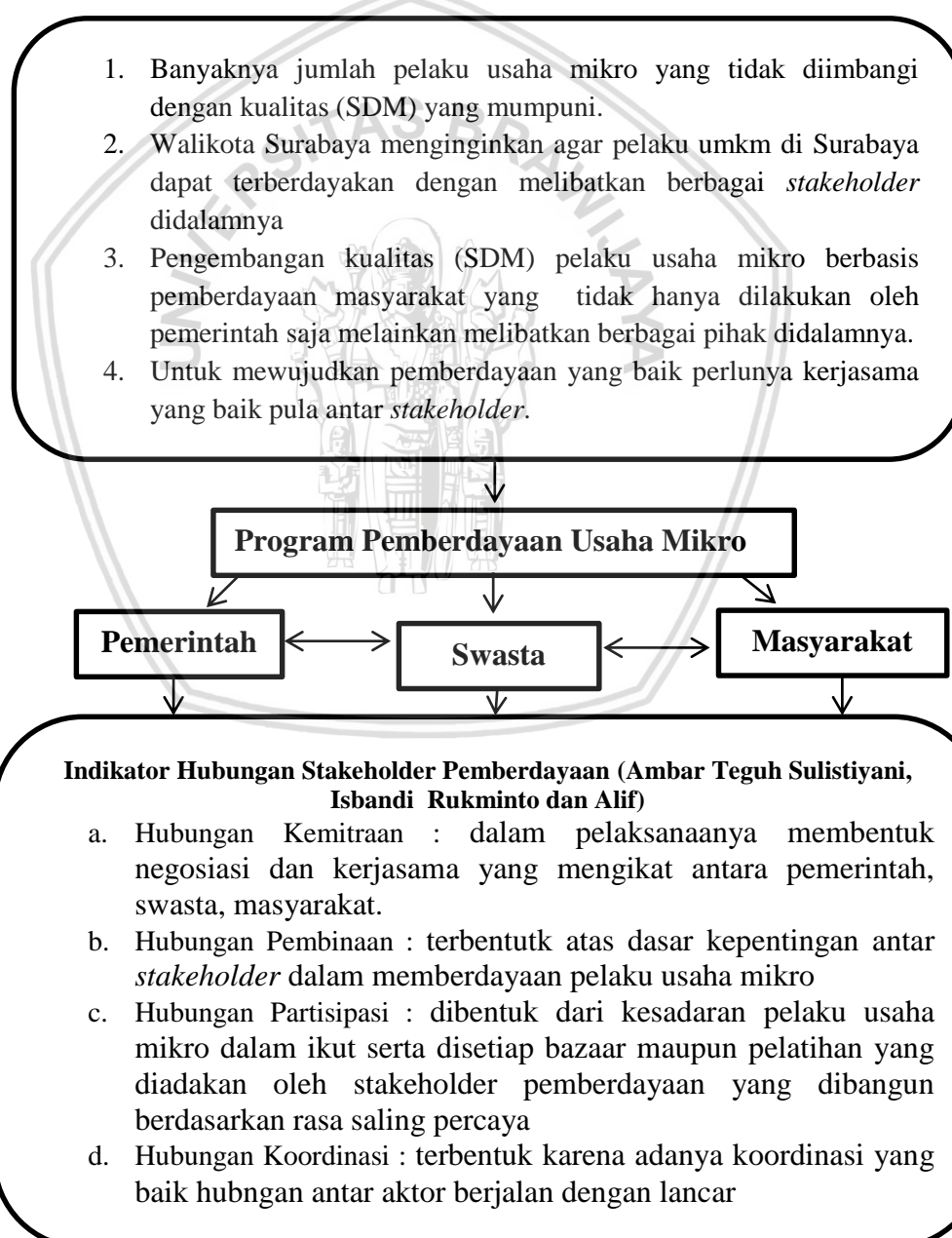
Koordinasi yang dilakukan dengan lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan dalam pemberdayaan. Koordinasi yang terjalin ialah koordinasi antara dinas dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau yang disingkat SKPD dalam rangka memadukan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

1.2 Alur Pikir Penelitian

²⁵ Alif, M.Si. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pusaka Belajar. Hlm 37.

Sebagai salah satu upaya dalam memudahkan penulis untuk mencari data, menganalisa dan memaparkan hasil analisa, maka dibuatlah sebuah alur pikir penelitian sebagai kerangka berfikir dalam penelitian. Berdasarkan pemaparan semoga bermanfaat penulis terkait latar belakang, fokus penelitian hingga konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan alur pikir penelitian sebagai berikut:

Bagan 2.2 Alur Pikir Penelitian





Hasilnya hubungan antar stakeholder program pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro Kota Surabaya dalam praktiknya berjalan cenderung cukup baik. Hanya saja pemberdayaan masih didominasi oleh Dinkop Surabaya; hubungan PT. Pelindo dan Dinkop cenderung kurang baik, karena adanya benturan kepentingan terkait perbedaan wewenang; Hubungan PT. Pelindo dengan pelaku UM mengarah pada hubungan antara atasan dan bawahan; hubungan akademisi dengan pelaku UM layaknya hubungan persaudaraan yang mengayomi.

Sumber: hasil olahan penulis, 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat beberapa bagian yang mengulas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Adapun bagian-bagian tersebut terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan. Bagian-bagian ini digunakan penulis dalam menyusun penelitian maupun hasil penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian terkait hubungan aktor pemberdayaan usaha mikro ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif digunakan peneliti guna mendapatkan jawaban dari hipotesis yang telah ditemukan melalui cara-cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode kualitatif menelaah bagaimana mendekati persoalan secara fenomenologis, artinya bahwa bagaimana cara mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (lisan dan tulis), ucapan, isyarat, pengalaman dan perilaku yang dapat diamati.¹ Penelitian ini menitik beratkan pada proses dalam pengungkapan makna yang ada di lapangan saat penelitian.

Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data secara mendalam serta mengandung makna. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan

¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, 2010, *Metode Penulisan Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta. Hlm. 228

umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis sendiri.²

Menurut crosswell, dalam penelitian kualitatif terdapat lima bentuk yakni, etnografi, *case study*, *grounded theory*, *narrative research* dan fenomenologi.³ Dengan berbagai konsekuensi dari desain penelitian kualitatif yang dinyatakan oleh Crosswell, peneliti tertarik akan menganalisis bagaimana hubungan antar aktor dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro Tas dan Dompot di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dengan desain studi kasus. Peneliti menggunakan studi kasus karena metode ini dianggap peneliti sesuai untuk menjawab pertanyaan seperti “mengapa” dan “bagaimana” metode ini menganalisis kasus kontemporer yang mana peristiwa tidak dapat dimanipulasi. Artinya bahwa peristiwa masih dapat dirasakan oleh peneliti pada waktu sekarang, dengan begitu teknik wawancara dan dokumentasi menjadi perlu dalam pengumpulan data.⁴

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan

² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2009. *Metodologi Penulisan Sosial edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 78.

³ John W. Crosswell. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publication, Inc. Hlm 14-15

⁴ Robert K.Yin. 2015. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 9

lengkap mengenai unit sosial tersebut. Tujuan studi kasus adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi sosial yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁵ Pendekatan studi kasus merupakan strategi yang lebih praktis bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa), apabila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata.⁶ Esensi studi kasus menurut Schramm, 1971 dalam buku Robert yang berjudul "*Studi Kasus Desain dan Metode*" bahwa kecenderungan utama dari semua jenis studi kasus adalah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya, dan apa hasilnya.⁷

Pada penelitian yang berjudul Hubungan antar Stakeholder dalam Pemberdayaan Usaha Mikro yang akan dilakukan oleh peneliti ini, dengan metode studi kasus yang digunakan karena peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang suatu fenomena yang terjadi antara hubungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai aktor Pemerintah, PT. Pelindo dan Bank Jatim sebagai aktor Swasta dan Pelaku usaha mikro tas dan dompet dan Akademisi Ciputra dan Airlangga sebagai aktor Masyarakat. Metode

⁵ Saifuddin Azwar, 2007, *Metode Penulisan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 8.

⁶ Robert K.Yin. *Op, Cit.* hlm 1

⁷ *Ibid.*, hlm. 17

studi kasus ini peneliti gunakan untuk menganalisis sejauh mana hubungan yang terjalin diantara ketiga aktor tersebut dan bagaimana bentuk kerjasama dari proses pemberdayaan itu terjadi diantara ketiga aktor tersebut. Kemudian dari sinilah akan terlihat aktor mana yang kurang atau belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Studi kasus sebagai alat penelitian memiliki tiga tipe yaitu eksploratoris, eksplanatoris dan deskriptif. Berdasarkan tipe-tipe tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membedakan ketiganya. *Pertama*, berdasarkan pertanyaan yang diajukan. *Kedua*, luas kontrol yang dimiliki peneliti atas peristiwa yang akan diteliti. *Ketiga*, fokusnya terhadap peristiwa kontemporer.

Pada penelitian eksplanatoris lebih banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan “apa” sedangkan “siapakah”, “dimanakah” dan “berapa banyak” lebih pada penelitian deskriptif. Sementara itu, untuk pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” biasanya menggunakan penelitian eksplanatoris. Tipe eksplanatoris yang menjadi fokus studi kasus akhirnya mendekati fenomena-fenomena kontemporer dengan bukti dan peristiwa yang tidak dapat dimanipulasi.⁸

Penelitian eksploratoris memiliki tujuan mengembangkan hipotesis dan proposisi yang berkaitan dengan inkuiri berikutnya. Sementara, eksplanatoris lebih memfokuskan penelitian pada usaha memajukan penjelasan-penjelasan tandingan pada rangkaian peristiwa yang sama dan

⁸ *Ibid*, hlm 12

menunjukkan bagaimana penjelasan semacam itu mungkin bisa diterapkan pada situasi-situasi yang lain. Penelitian deskriptif lebih mencoba melacak urutan peristiwa, hubungan antar pribadi, menggambarkan subbudaya yang sudah jarang menjadi topik penelitian dan menemukan fenomena kunci.⁹ Penelitian yang ingin mengetahui hubungan aktor dalam pemberdayaan usaha mikro Tas dan Dompet peneliti menggunakan metode eksplanatoris yang berusaha memperkuat atau menguji teori/hipotesis yang sudah diketahui kebenarannya.

Desain penelitian studi kasus merupakan hal yang penting dan harus menjadi perhatian utama bagi peneliti yang menggunakan studi kasus. Desain penelitian adalah bagaimana studi kasus itu dilakukan dari awal hingga akhir atau laporan penelitian selesai. Tujuan digunakannya desain penelitian untuk menjawab empat masalah dalam penelitian yaitu pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana bukti/data menjadi relevan, data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana menganalisis hasilnya.¹⁰

Adapun lima komponen desain untuk menjawab empat masalah desain penelitian, kelima komponen desain tersebut yaitu *Pertama*, pertanyaan yang berkenaan dengan “apa”, “bagaimana”, “mengapa”, “siapa”, “dimana” yang mana pertanyaan penelitian harus dilihat bentuk dan substansi pertanyaan. *Kedua*, proposisi yang mana suatu kalimat

⁹ *Ibid*, hlm 5-7

¹⁰ *Ibid*, hlm 28

dapat dinilai benar atau salahnya. *Ketiga*, unit analisis yaitu mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan studi kasus dalam suatu penelitian. *Keempat*, bukti analisis. *Kelima*, menginterpretasi temuan.

Dalam upaya menguji kualitas desain penelitian, studi kasus memiliki empat aspek untuk menguji kualitas desain penelitian yaitu, (a) validitas konstruk, adalah cara untuk menguji kualitas penelitian dengan menetapkan ukuran operasional bagi konsep yang akan diteliti, dan ditempuh dengan mengambil sumber bukti yang tidak tunggal, membangun rangkaian bukti dan informan kunci meninjau draft laporan studi kasus. (b) validitas internal, digunakan untuk penelitian eksplanatoris. (c) validitas eksternal, untuk menentukan ranah dimana temuan penelitian bisa divisualisasikan. (d) reliabilitas, untuk menunjukkan pelaksanaan suatu penelitian dapat diinterpretasikan dengan hasil yang sama.¹¹

Penelitian ini lebih fokus pada desain kasus tunggal dibandingkan dengan desain multikasus. Desain ini dipilih sejak peneliti akan menentukan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain kasus tunggal menguji kebenaran suatu teori yang telah disusun dengan proposisi dimana kebenarannya telah diyakini atau mengajukan alternatif penjelasan yang lebih relevan.¹² Sementara itu pada desain multikasus berusaha untuk memandang multikasus sebagai multieksperimen dengan

¹¹ *Ibid*, hlm 38.

¹² *Ibid*, hlm 47

mengikuti logika replika dan bukan mengikuti logika sampling ala eksperimen.¹³

Studi kasus tunggal dapat dibedakan dengan dua hal, tergantung dari masalah apa dan cakupan masalah yang akan diteliti. Jika masalahnya hanya tunggal dan mengkaji sifat umum suatu masalah maka ia disebut penelitian studi kasus tunggal holistik. Sedangkan apabila penelitian kasus tunggal memiliki lebih dari satu unit analisis maka ia disebut penelitian studi kasus terjalin¹⁴. Penelitian mengenai hubungan aktor dalam tata kelola pemberdayaan pelaku usaha mikro tas dan dompet di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini merupakan model studi kasus terjalin karena menganalisis lebih dari satu unit analisis yakni hubungan antar aktor dan pemberdayaan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang terletak di Jalan Gayungsari No 1 Kota Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, penulis juga terjun langsung ke masyarakat selaku aktor pelaku usaha mikro yaitu pelaku usaha mikro tas dan dompet untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini. Hal ini dikarenakan sesuai pokok masalah yang penulis angkat yakni mengenai hubungan aktor dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Surabaya yang terkhususkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

¹³ *Ibid*, hlm 56

¹⁴ *Ibid*, hlm 52.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat berguna bagi penulis karena mempermudah dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu tentang data mana yang diperlukan ataupun data mana yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa adanya fokus penelitian dapat mempermudah penulis dalam mengambil data serta mengolahnya hingga menjadi kesimpulan. Sehubungan dengan pokok masalah yang diteliti, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah hubungan aktor dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Surabaya yang terkhususkan pada pelaku usaha mikro tas dan dompet yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

3.4 Jenis Data

Untuk menunjang penelitian ini maka penulis sejatinya membutuhkan banyak data yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data penelitian ini merupakan subyek darimana data itu dapat diperoleh penulis. Data memiliki makna sebagai keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari suatu subyek atau bagian subyek yang digunakan untuk menerangkan ciri-ciri subyek yang bersangkutan.¹⁵

Adapun jenis data yang dianalisis yakni :

- a. Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat

¹⁵ Richard Lungan, 2006, *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 13.

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Data primer ini diperoleh dari orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui perantara, yaitu diperoleh melalui hasil wawancara. Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini penulis lakukan melalui wawancara.

- b. Data sekunder, atau data tangan kedua, adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, dengan kata lain tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data data laporan yang telah tersedia.¹⁷ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, buku-buku ilmiah serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian yakni terkait hubungan aktor dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Surabaya yang terkhususkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif sumber data berada dalam situasi yang wajar (*natural setting*), tidak dimanipulasi oleh data

¹⁶ Saifuddin Azwar. *Op. Cit.*, hlm. 91

¹⁷ Saifuddin Azwar. *Loc.cit*

¹⁸ Sugiyono, 2012. *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. Hlm. 62

dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen.¹⁹ Penulis melakukan tiga langkah dalam proses pengumpulan data antara lain melakukan wawancara, dan dokumentasi. Tiga hal ini dianggap penting dan tepat oleh penulis dalam proses pengumpulan data.

3.5.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Teknik pengumpulan data ini akan sangat membantu penulis agar mengetahui secara mendalam hal-hal yang tidak diketahui penulis dan menginterpretasikan kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan, dimana hal tersebut tidak dapat ditemukan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi.

Penulis memulai wawancara dengan memilah terlebih dulu beberapa informan yang dianggap penting dan utama. Selain informan utama, penulis juga membutuhkan informan tambahan sebagai informan lain yang memiliki sudut pandang berbeda. Selanjutnya penulis mengadakan sendiri kontak dengan narasumber. Setelah narasumber memberikan izin, maka penulis kemudian melakukan persiapan untuk wawancara sesuai kesepakatan yang ada, jika memang ada, antara *interviewer* dan

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Op. Cit.*, Hlm. 99

²⁰ Ibid, Hlm 186

narasumber. Setelah penulis dan narasumber bersepakat mengenai waktu wawancara, maka penulis memulai wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pedoman wawancara adalah hal yang penting dipersiapkan sebelum melakukan wawancara, tujuannya agar informasi yang diinginkan tidak terlewat dan arah pembicaraan tidak jauh dari topik yang seharusnya. Di kalangan penulis kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan penulis berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Dalam proses pengumpulan data hal utama yang dilakukan adalah menentukan subjek penelitiannya.

Hal itu penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan informan, sebab dari informan ituah diharapkan informasi dapat terkumpul guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²¹ Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sektor swasta seperti carrefour dan ciputra, dan masyarakat yaitu pelaku usaha mikro itu sendiri. Dibawah ini merupakan tabel daftar informan dan jabatannya.

Tabel 3.1
Data Informan Peneliti

²¹ Muhammad Idrus, 2009. *Metode Penulisan Ilmu Sosial*, Erlangga, Jakarta, hlm.91-92.

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Dra. Ec. SUNARSIH, MM	Kepala Bagian Usaha Mikro
2	Yusdi Ernawan	Kepala Seksi Kemitraan
3	Jumiati, SE	Staff Seksi Bina Usaha Produktif
4	Ir. Hestining Probowati, M.Si	Kepala Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha
5	Drs.Ec. Endro Bintoro	Kepala Bagian Keuangan Usaha Mikro
6	Agung	Staff Donatur CSR Perbankan (Bank Jatim)
7	Suyitno	Pelaku UM (Tas dan Dompot)
8	Ibu Rahma	Staff PT. PELINDO
9	Stanislaus Adnanto M., SE, S.KOM. MSA, OCA., CPC.	Akademisi Ciputra
10	Sigit Kurnianto S.E M.S.A. Ak. Sas CA. AAP	Akademisi Universitas Airlangga

Sumber: olahan penulis, 2017

3.5.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya yaitu data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama dan jika ada kesalahan cetak, maka penulis ikut salah pula dalam mengambil datanya.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara cenderung bersifat data primer yang didapat

langsung dari pihak pertama.²² Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, data jumlah pelaku usaha mikro dan jenis usahanya, rencana kerja, laporan akuntabilitas publik dan Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. Peneliti akan menggunakan dua teknik analisis data. Terdapat tiga teknik analisis data dalam bentuk-bentuk analisis dominan studi kasus, yaitu penjadohan pola, pembuatan penjelasan dan analisis deret waktu. Ketiga strategi tersebut dapat digunakan baik pada penelitian kasus tunggal maupun multikasus. Berikut ini penjabaran dari bentuk-bentuk analisis dominan dalam studi kasus.²³

1) Penjadohan Pola

Logika penjadohan pola membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksi atau dengan beberapa prediksi alternatif. Apabila terdapat kesamaan pada kedua pola, maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Tetapi, apabila studi kasus yang bersangkutan

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Op. Cit.*, Hlm. 69

²³ Robert K. Yin, *Op. Cit.*, Hlm 140

eksploratoris, polanya mungkin berkaitan dengan variabel-variabel dependen atau independen dari penelitian yang bersangkutan (atau keduanya). Apabila studi kasus deskriptif, penjadohan pola akan relevan dengan pola variabel-variabel spesifik yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan datanya.

2) Pembuatan Eksplanasi

Tujuan dari pembuatan eksplanasi untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus terkait. Strategi ini relevan untuk studi kasus eksplanatoris. Jika digunakan pada studi kasus eksploratoris umumnya dipandang sebagai bagian dari proses pengembangan hipotesis, yang mana tujuannya bukan untuk menyimpulkan suatu penelitian tetapi untuk mengembangkan gagasan-gagasan untuk penelitian selanjutnya.

3) Analisis Deret Waktu

Strategi analisis yang ketiga adalah analisis deret waktu yang secara langsung analog dengan analisis deret waktu yang dilakukan dalam eksperimen dan kuasi eksperimen.

Dalam penelitian yang membahas mengenai hubungan aktor dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro tas dan dompet di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, peneliti menggunakan teknik analisis penjadohan pola. Penjadohan pola dilakukan menggunakan logika penjadohan pola yaitu bagaimana membandingkan pola yang berdasar pada empiris dengan pola yang

telah diprediksikan. Apabila kedua pola sama maka valditas internal penelitian telah teruji.



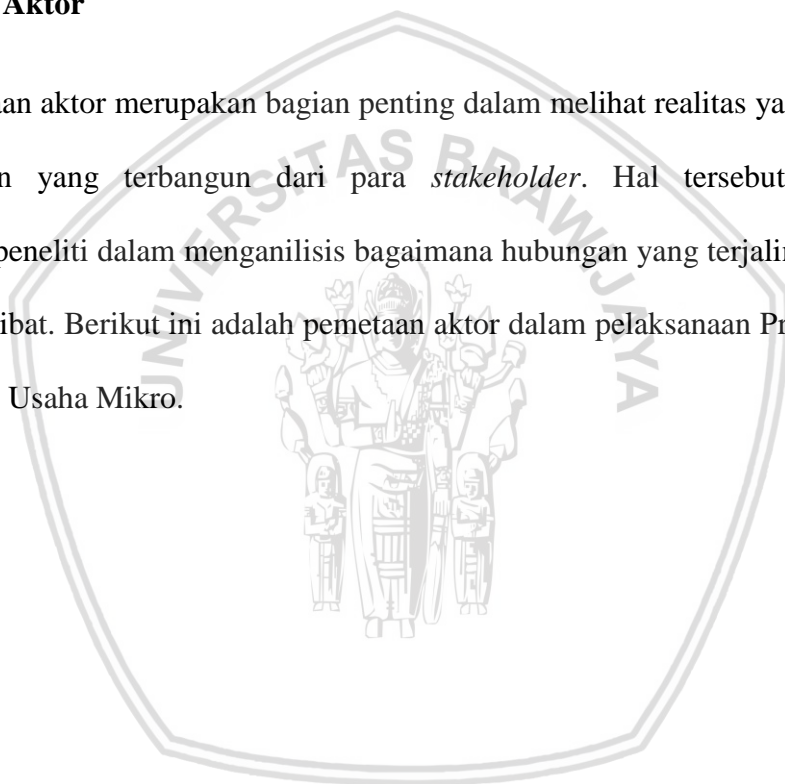
BAB IV

PEMETAAN DAN PERAN STAKEHOLDER

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang deskripsi wilayah penelitian, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai siapa saja aktor yang terllibat dan bagaimana peran, tugas dan fungsinya.

4.1 Pemetaan Aktor

Pemetaan aktor merupakan bagian penting dalam melihat realitas yang ada dari hubungan yang terbangun dari para *stakeholder*. Hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam menganalisis bagaimana hubungan yang terjalin antar aktor yang terlibat. Berikut ini adalah pemetaan aktor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro.



Tabel 4.1

Pemetaan Stakeholder Pemberdayaan

No	Nama	Aktor	Peran
1	Dra. Ec. SUNARSIH, MM	Pemerintah	Kepala Bagian Usaha Mikro
2	Yusdi Ernawan	Pemerintah	Kepala Seksi Kemitraan
3	Jumiati, SE	Pemerintah	Staff Seksi Bina Usaha Produktif
4	Ir. Hestining Probowati, M.Si	Pemerintah	Kepala Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha
5	Agung	Swasta	Staff Bagian Donatur CSR Perbankan (Bank Jatim)
6	Ibu Rahma	Swasta	Staff PT. Pelindo Surabaya
7	Stanislaus Adnanto M., SE, S.KOM. MSA, OCA., CPC	Masyarakat	Akademisi Ciputra
8	Sigit Kurnianto S.E M.S.A. Ak. Sas CA. AAP	Masyarakat	Akademisi Airlangga
9	Suyitno	Masyarakat	Pelaku UM (Tas dan Dompot)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

Pada sub pembahasan penelitian ini peneliti membagi aktor kedalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjabarkan dan menganalisis peran dari masing-masing aktor. Berdasarkan peran tersebutlah maka akan terlihat nantinya bagaimana hubungan yang terjalin diantara para *stakeholder* dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro.

4.1.1 Pemerintah

Aktor pemerintah yang terlibat dalam program pemberdayaan usaha mikro yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaksana. Dalam hal ini pemerintah sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dikepalai oleh Drs. Eko Haryanto, MM. Selain itu, seluruh staff yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pun ikut andil sesuai dengan bidang yang digelutinya. Adapun keterlibatan seluruh SKPD Kota Surabaya yang juga turut ikut menyukseskan pelaksanaan program. Aktor-aktor yang terlibat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa pelatihan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi legalitas, seperti yang diungkapkan Oleh Ibu Jumiati selaku staff seksi bina usaha produktif.¹

Berdasarkan mekanisme pelaksanaannya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya melakukan pendataan usaha mikro binaan baru. Berhubung segala hal yang berkaitan dengan usaha mikro dilimpahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk itu, dinkop yang akan menerima jenis usaha apa saja yang akan masuk menjadi binaannya. Tak dapat dipungkiri bahwa kategori usaha mikro ini merupakan kategori yang memiliki banyak peminat dibanding kategori usaha lain. Dalam artian lain, kategori usaha

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jumiati, *Op.cit.*

mikro ini merupakan sektor yang paling mudah dimasuki oleh setiap orang, karenanya tidak sedikit pelaku usaha mikro baru yang muncul.

Setelah dilakukannya pendataan usaha mikro, data yang telah didapatkan akan dilakukan pengecekan dengan survei langsung ke tempat usahanya. Pengecekan tempat usaha untuk memastikan keberadaan pelaku usaha mikro. Dengan kata lain, dicari tahu benar atau tidaknya keaktifan dan keberadaan usaha tersebut. Pengecekan sendiri dilakukan oleh tenaga pendamping usaha. Apabila usaha mikro terbukti benar keberadaannya maka akan dicatat dan barulah kemudian dibina dibawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Langkah selanjutnya yaitu penilaian persyaratan produk usaha mikro. Penilaian persyaratan produk meliputi kepemilikan legalitas usaha seperti PIRT, MERK, SIUP, TDP, BPOM RI dan Sertifikasi Halal. Disamping itu akan dinilai juga omset, kemasan (*packaging*) produk dan tingkat pemasaran. Setelah itu kemudian dilakukan penilaian terhadap produk pelaku usaha mikro. Data tersebut digunakan agar dapat terlihat kelebihan dan kekurangan apa yang dimiliki usaha mikro. Inilah kemudian yang menjadi target Dinkop untuk menentukan usaha mana yang sudah pantas untuk nantinya dimitrakan.

Usaha mikro yang telah menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kemudian diikuti dengan berbagai macam sosialisasi, bazaar, pameran hingga dibuatkan sorum yang khusus untuk para pelaku usaha mikro menjual karya dan usahanya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis dengan melibatkan Universitas Airlangga dan Ciputra sebagai narasumber untuk mengisi materi yang berbeda setiap bulannya. Materi yang biasa diberikan salah satunya adalah manajemen kewirausahaan, akuntansi, dasar-dasar pembukuan, peningkatan kualitas produk, dan sebagainya. Pelaku usaha mikro juga mendapat sertifikat sebagai bukti jika telah mengikuti acara sosialisasi tersebut. Setelah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengikutsertakan pelaku usaha mikro ke berbagai *event* barulah kemudian akan dilakukannya seleksi terhadap pelaku usaha mikro. Seleksi yang dimaksudkan tujuannya untuk memilah usaha mana yang sekiranya sudah mampu untuk kemudian dimitrakan dengan pihak luar yakni swasta.

4.1.2 Swasta

Aktor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro yaitu PT. Pelindo dan Bank Jatim. Aktor swasta yang berperan disini sebagai donatur pelaksanaan program pemberdayaan. PT. Pelindo merupakan CSR dari perusahaan sedangkan Bank Jatim merupakan CSR dari perbankan. Kedua donatur tersebut memberikan dana modal usaha kepada pelaku usaha mikro untuk kemudian dikembangkan usahanya. Mekanismenya yaitu data pelaku usaha mikro yang ada pada bidang usaha mikro diberikan kepada bidang kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang kemudian pelaku usaha mikro dipertemukan dengan para donatur untuk kemudian dimitrakan.

4.1.3 Masyarakat

Aktor dari masyarakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu aktor akademisi dan masyarakat pelaku usaha mikro itu sendiri. Aktor dari akademisi yaitu Universitas Airlangga dan Ciputra. Aktor dari akademisi inilah yang kemudian menjadi narasumber untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pelaku usaha mikro. Sementara itu, aktor kedua dari masyarakat yaitu pelaku usaha mikro itu sendiri. Masyarakat yang terlibat dalam hal ini adalah pelaku usaha mikro yang menggeluti bidang fashion. Masyarakat inilah yang kemudian turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik itu pemberdayaan yang bersifat pelatihan maupun fasilitasi legalitas.

4.2 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya merupakan salah satu dari dua puluh dua Dinas Daerah yang ada di kota Surabaya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha mikro. Mulai tanggal 3 Januari 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dipimpin oleh Drs. Eko Haryanto, MM.

Pada tahun 2016 sejak dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya terdapat perubahan nomenklatur di sejumlah SKPD di Kota

Surabaya salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang sebelumnya bernama Dinas Koperasi dan Usaha mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surabaya.

Instansi pemerintahan di Kota Surabaya yang dipilih untuk mendalami penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Dinas ini merupakan salah satu Dinas yang memiliki visi dan misi berkaitan dengan kemajuan Usaha Mikro. Disamping itu, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang beralamatkan di Jalan Gayung Sari No.I Kota Surabaya menjadi tempat penelitian karena menurut data yang didapat penulis bahwa Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota di Provinsi Jawa Timur yang Usaha Kecil Menengahnya paling banyak melakukan kegiatan dan perintisan ekspor dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur.²

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pemerintah Kota Surabaya, angka kemiskinan menurun seiring dengan melonjaknya jumlah para pelaku Usaha Mikro Surabaya. Hal tersebut bisa terjadi tak lepas dari keberhasilan

² Betsy Setiono. 2012. *"Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam Perolehan Hak Merek Bagi Usaha Kecil Menengah Inovatif"*. Diunduh dari <http://www.jurnal.unair.ac.id> pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 14.00 WIB

Dinas yang bergerak pada bidang Perekonomian, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Lingkup kerja SKPD memiliki hubungan dengan SKPD dari Dinas lainnya yang berada pada bidang yang sama, yakni Perekonomian, hasil data yang menunjukkan jumlah Usaha Mikro meningkat dan angka kemiskinan menurun ini merupakan salah satu tanda bahwa SKPD Kota Surabaya telah bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, yang tentunya juga menandakan bahwa koordinasi instansi antar SKPD di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik.

Dasar Hukum Organisasi yang masih digunakan saat ini ialah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Peraturan perundang undangan yang diatur dalam hal ini merupakan suatu hal yang berkaitan langsung dengan implementasi pemberdayaan pelaku usaha mikro. dinas koperasi dan usaha mikro dalam memberdayakan pelaku usaha mikro ada payung hukum yang mengikat hal tersebut sehingga orang-orang yang terlibat didalamnya harus tunduk pada aturan yang berlaku di Dinas koperasi dan usaha mikro surabaya.

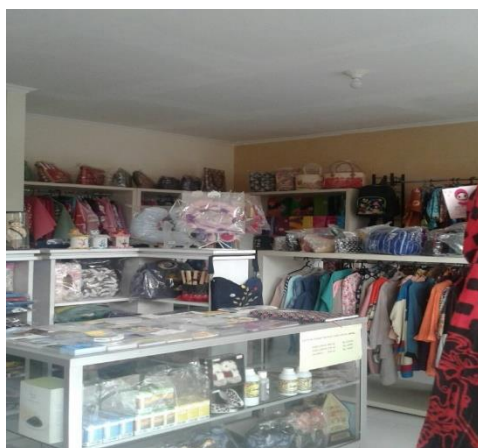
Banyaknya pelaku usaha mikro di Kota Surabaya menjadi bukti bahwa usaha-usaha mikro mengalami perkembangan yang semakin baik dalam penerapannya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro menjadi salah satu yang membantu berdirinya usaha mikro melalui pemberdayaan seperti, pemasaran, pelatihan, bimbingan dan promosi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meng-agendakan kegiatan bazaar dan pameran dengan tujuan agar produk-produk pelaku usaha mikro dipromosikan terhadap masyarakat luas di Kota Surabaya. Tujuan dari kegiatan bazaar dan pameran yang diadakan itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menginginkan produk-produk usaha mikro dapat dikenal masyarakat luas.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya dengan melibatkan peran masyarakat serta swasta. Dalam praktiknya terjadi kerjasama dan negosiasi antar *stakeholder* yang terlibat dan menjalin hubungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Dinas koperasi dan usaha mikro pun memiliki peran yang penting dalam mengembangkan usaha mikro di Surabaya.

Membuat sorum salah satu upaya dinas koperasi dan usaha mikro mengembangkan usaha mikro. Sorum adalah tempat diperjual belikan barang-barang usaha mikro mulai dari usaha sejenis fashion hingga barang-barang yang didaur ulang. Usaha mikro yang dipajang dalam sorum tidak dikenai biaya apapun, tempat yang disediakan pun gratis dan cukup luas untuk menyimpan jualan usaha mikro.

Gambar 4.1
Sorum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Disamping itu, peran dinas koperasi dalam memberdayakan pelaku usaha mikro juga mengatur secara manajemennya, dengan kata lain *manage* pelaku usaha mikro dengan cara mengikutsertakan ke berbagai kegiatan pelatihan dan mengikutsertakan *bazaar*. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membantu dalam hal promosi. Setiap bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki rutinitas mengadakan kegiatan bazaar dengan tujuan untuk mempromosikan produk-produk dari pelaku usaha mikro yang ada di Kota Surabaya.

“...iya mbak kita ini di dinkop ngadain semacam bimtek gitu, sosialisasi gitu untuk manajemen usaha mikronya. Kita undang

pelaku usaha mikro untuk datang ke acara sosialisasi, bimtek, bazaar ya tujuannya untuk mengenalkan produk mereka”³

Dari kegiatan bazaar tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya berharap dapat mengenalkan produk-produk dari Kota Pahlawan ini kepada masyarakat luas. Dari rutinitas bazaar tersebut juga dapat diketahui produk mana yang banyak diminati oleh masyarakat. Setelah mengetahuinya kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya akan memberikan pembinaan baik mengenai produk, perijinan, maupun pemasaran. *Bazaar* tersebut sebagai salah satu bentuk pemasaran yang dilaksanakan secara bergantian mengingat produk usaha mikro yang berasal dari Kota Surabaya memiliki jenis yang berbeda-beda.

Pemasaran yang dilakukan usaha mikro tidak hanya pada sorum yang difasilitasi pemerintah. Sorum ialah salah satu tempat yang digunakan oleh pemerintah untuk kemudian digunakan pelaku usaha mikro berjualan. Selain sorum, pelaku usaha mikro juga diberikan kebebasan diluar dari wilayah sorum untuk memasarkan produknya baik secara *online* maupun *offline*, keleluasaan yang diberikan pemerintah tersebut mengingat besarnya peluang dalam mencari pelanggan diluar sorum.

Masing-masing usaha mikro memiliki kartu nama yang mana didalamnya terdapat nomor handphone dan alamat pelaku usaha mikro. Dengan begitu, masyarakat luas tidak harus datang ke sorum apabila ingin membeli produk usaha mikro, karena pelaku usaha mikro juga membuka

³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jumiati, *Op.cit.*

usahanya di rumah dan beberapa lainnya di *market places*. Upaya memasarkan produk pelaku usaha mikro selain melalui cara offline, juga melalui cara *online* atau *e-commerce*. Promosi yang dilakukan melalui akun media sosial yang dimiliki pelaku usaha mikro.

Peran lain yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya adalah sebagai fasilitator atau kepanjangan tangan antara pelaku usaha mikro dengan pihak lainnya. Seperti fasilitasi pengembangan usaha mikro dan fasilitasi permodalan yang akan dijabarkan lebih mendalam pada pembahasan berikutnya.

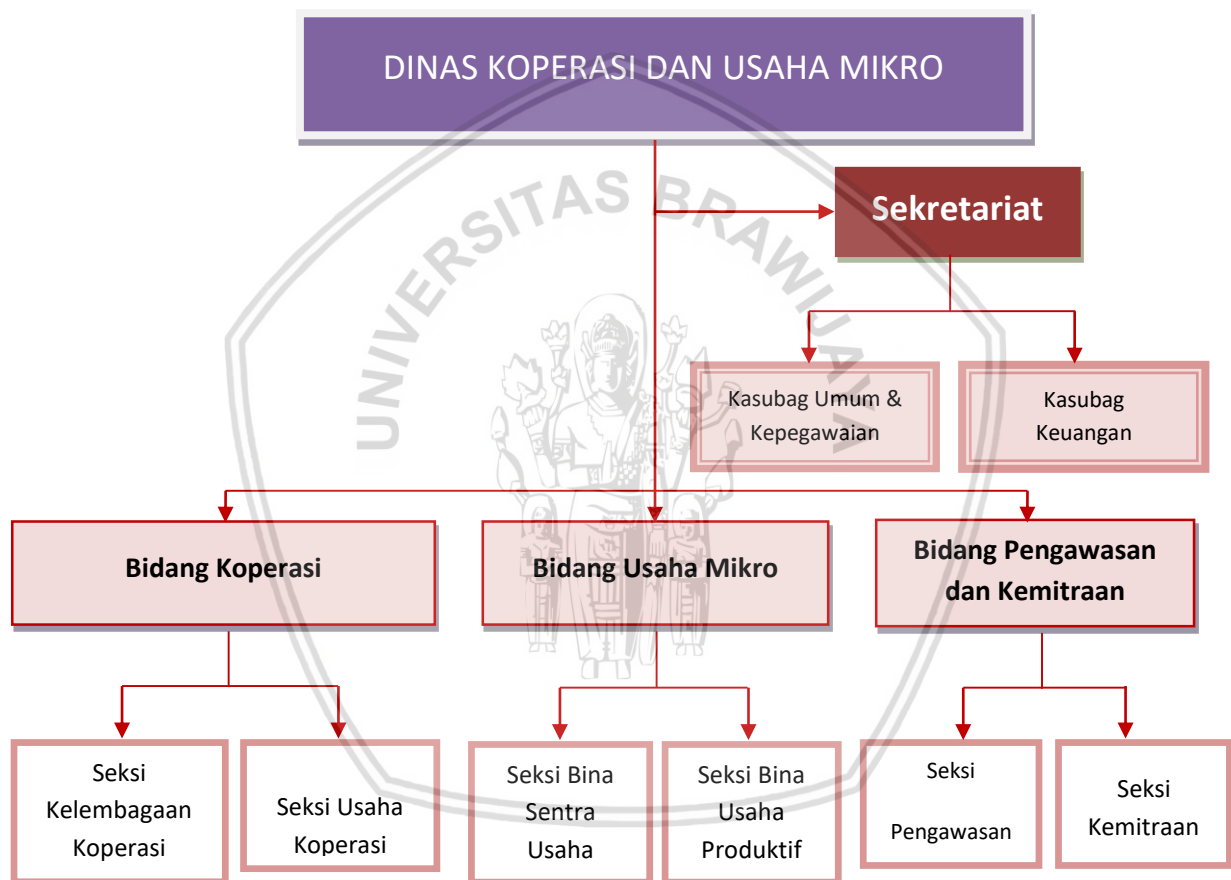
4.2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta membutuhkan struktur organisasi untuk memudahkan kejelasan hubungan antar bagian, fungsi serta pertanggungjawaban demi menunjang pencapaian tujuan. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.⁴

⁴ Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya



Sumber: LAKIP, Dinas Koperasi 2016

4.2.2 Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 62 tahun 2018 tentang Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Perangkat Daerah yang

diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Berikut penjabaran tugas dan fungsi di Dnas Koperasi dan Usaha Mikro:⁵

1. Tugas Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya terdiri dari :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Bagian Sekretariat
3. Bidang Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro
5. Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha

2. Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang :

- a. Koperasi dan Usaha Mikro ;
- b. Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Dinas ;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum ;
- d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan retribusi kekayaan daerah
- e. Mengelola ketata usahaan Dinas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dibidang kesekretariatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

⁵ Ibid.

Sekretaris mempunyai fungsi: Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program / kegiatan, anggaran dan pelaporan Dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatatlaksanaan
- d. Pengelolaan kepegawaian
- e. Pengelolaan penatausahaan Dinas beserta lingkungan dan sarana / prasarana pendukung
- f. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan.
- g. Pengelolaan unit loket pelayanan
- h. Pelaksanaan pengembangan unit teknologi informasi
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Bidang Koperasi

Bidang koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang koperasi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan koperasi;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang koperasi;
- d. Pelaksanaan pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan / sosialisasi tentang perkoperasian;
- e. Pelaksanaan pelayanan pemberian fasilitasi dalam penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;
- f. Pemrosesan surat rekomendasi dinas dalam penerbitan akta pendirian koperasi;
- g. Pelaksanaan proses perizinan;
- h. Pelaksanaan pengenalan perkoperasian di lingkungan sekolah menengah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang usaha mikro ; Rincian tugas Bidang usaha mikro, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha Mikro;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan Usaha Mikro;

- c. Pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman milik pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Usaha Mikro;
- e. Pelaksanaan proses perizinan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- f. Pengelolaan ruang pamer produk Usaha Mikro; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. Bidang Pengawasan dan Kemitraan

Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha.

Rincian tugas Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Kemitraan dan Pengawasan Usaha ;
- b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Kerja dan Kegiatan di bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha;
- c. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi ;
- d. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kemitraan dan Pengawasan Usaha;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Peran Akademisi (Ciputra dan Airlangga) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya

Peran akademisi sangatlah penting dalam perkembangan masyarakat. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat dalam transformasi menuju masyarakat global. Maka tidak dapat dipungkiri jika perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan kewirausahaan. Sehingga mengapa perlunya dilakukan kegiatan pemberdayaan Usaha mikro oleh perguruan tinggi dengan dibantu oleh

pemerintah dan pihak terkait sehingga Usaha mikro dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

“...Kalau bahas masalah usaha mikro kan luas ya mba. Kebetulan saya ini dipercayakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya untuk memberikan bimbingan kepada pelaku usaha mikro binaannya. Karena usaha mikro ini masih pada tahap mau maju menjadi usaha kecil dan menengah jadi lumayan sulit untuk memberikan arahan apabila kurangnya tekad yang kuat dari pelaku usaha mikro itu sendiri. Disini peran kita agar mereka mau terus semangat menjalani usahanya kita berikan bimbingan”⁶

Disini peran yang dijalankan oleh ciputra dan airlangga memiliki kesamaan posisi. Kedua peran tersebut bersama-sama menjadi narasumber yang akan memberikan ilmu kewirausahaan dan pembukuan dasar untuk pelaku usaha mikro. Tidak hanya itu peran dari masing-masing akademisi ini memberikan motivasi yang besar terhadap keberlanjutan usaha mikro.

4.4 Peran BUMN (PT. PELINDO) dalam Perbedayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya

PT. PELINDO (Pelabuhan Indonesia) adalah salah satu perusahaan BUMN yang memiliki Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang memiliki tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan taraf hidup masyarakat memberikan bantuan bagi para pelaku UMKM sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan bantuan yang diberikan PT. PELINDO melalui PKBL untuk

⁶ Wawancara dengan bapak sigit selaku Akademisi Airlangga. Pada tanggal 15 Februari 2018. Pukul 14.20 WIB

pelaku Usaha mikro bidang fashion di Kota Surabaya adalah berupa bantuan pinjaman permodalan, pembinaan dan pelatihan, serta bantuan dalam hal pemasaran yaitu mengikutkan mereka pada kegiatan pameran.

“Kalau dari kita untuk yang bidang fashion itu dapat bantuan permodalan, pinjaman permodalan, nah kalau di setiap BUMN kan pasti ada semacam PKBL gitu, jadi kita membina mereka siih. Membinanya bisa ngasih modal terus mengikutsertakan mereka pameran, ada juga pelatihan. udah sering sih mereka kayak diundang ke pelatihan-pelatihan gitu. Seperti pelatihan pemasaran, terus penjualan secara online. kebetulan yang terakhir kemarin itu ada soal pemasaran online iitu. Tapi ya gatau sih mereka sudah menerapkan apa belum, soalnya kan ribet sama produksinya juga mba”⁷

Dalam PKBL ini PT. PELINDO bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas terkait dalam hal pendataan usaha mikro yang membutuhkan bantuan. Dalam pelaksanaannya, Dinas koperasi dan usaha mikro yang telah memiliki data memberikan usulan mengenai usaha mikro mana yang sekiranya membutuhkan bantuan dari PT. PELINDO. Sementara itu, untuk proses permohonan bantuan, pemberian bantuan, hingga pembayaran pelunasannya Dinas terkait tidak lagi ikut andil di dalamnya.

Menurut penjelasan dari Ibu Rahma, bantuan berupa pinjaman modal dari PT. PELINDO dalam 1 tahun terbagi menjadi 3 sampai dengan 4 kali penyaluran. Sedangkan 1 periode pinjaman harus dilunasi dengan jangka waktu 3 tahun. Pelaku usaha mikro juga berhak mendapatkan pinjaman modal maksimal 3 kali pinjaman dengan maksimal jumlah nominal Rp. 75.000.000. Untuk angsurannya dilakukan per bulan dengan

⁷ Wawancara dengan Ibu Rahma selaku Staff PT. PELINDO, pada 19 Maret 2018, 10:51 WIB.

bunga 6% per tahun atau sekitar 0,5% per bulannya. Bunga yang dibayarkan tersebut nantinya akan digunakan oleh PT. PELINDO untuk operasional kegiatan yang berkaitan dengan PKBL.⁸

4.5 Peran Perbankan (Bank Jatim) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Bank Jatim untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁹ Dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Bank Jatim dilakukan oleh *Corporate Secretary* sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu dengan subyek komunitas setempat maupun masyarakat yang ruang lingkupnya meliputi bidang-bidang pendidikan, budaya, kesehatan dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan penuturan bapak Agung selaku staf bagian donatur dari bank jatim berikut.¹⁰

“...jadi mbak kita disini itu hanya memberikan dana untuk komunitas-komunitas masyarakat seperti bidang pendidikan, sosial dan masih banyak lagi. Nah salah satunya ya itu usaha mikro mba kita memberikan donasi kepada mereka yang selanjutnya bisa mereka gunakan untuk kemajuan usahanya.”

⁸ Ibid.

⁹ Diakses pada <http://www.bankjatim.co.id> pada tanggal 11 April 2018. Pukul 18.35 WIB

¹⁰ Wawancara dengan bapak agung selaku Staff pada bidang donatur Bank Jatim, pada 19 Maret 2018, 15:31 WIB.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Jatim diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang tercakup dalam program yang terarah dan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik diantara masing-masing unit organisasi. Sebagai wujud dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Jatim, Direksi Bank Jatim telah menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaannya berdasarkan peraturan dan mengacu pada praktek unggulan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar terjadi kesamaan dalam orientasi dan pelaksanaan kepedulian Bank Jatim terhadap sosial masyarakat dan lingkungannya dalam rangka mendukung dan memberi kontribusi pada pencapaian visi dan misi Bank Jatim.¹¹

4.6 Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya

4.6.1 Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Bidang Fashion Tas dan Dompot

Industri usaha mikro tas dan dompet di Kota Surabaya salah satunya berada di daerah runkut kota surabaya. Bapak suyitno dan ibu siska adalah salah satu warga runkut yang merupakan produsen tas dan dompet sejak tahun 1990 an. Menurut beliau, perkembangan industri UMKM dibidang fashion di Kota surabaya hingga saat ini mengalami perkembangan yang lumayan bagus. Akan tetapi masih memiliki kendala dan kekurangan dalam hal kualitas bahan. Bahan yang digunakan tersebut masih sangat sederhana, hanya menggunakan *polyester* dan kanvas beberapa juga dari hasil daur

¹¹ Ibid.

ulang yang dijadikan dompet seperti bungkus kopi dan minuman serbuk sejenisnya. Meskipun demikian hal tersebut merupakan sebuah peningkatan dari sebelumnya hanya mendaur ulang, saat ini tas dan dompet lebih maju dari segi bahan yang digunakan mulai menarik minat masyarakat luar.

“Modelnya dan bahan ya seperti itu apa adanya, masih biasa saja, tapi ya itu *wes* lumayan lah, yang sebelumnya *iku* malah hanya mengandalkan hasil daur ulang untuk pembuatan tas dan dompetnya.”¹²

Dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan bapak suyitno dan ibu siska selaku pelaku usaha mikro tas dan dompet pernah mengikuti beberapa kegiatan seperti seminar serta pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Beberapa materi pelatihan yang pernah diadakan antara lain seperti pelatihan mengenai produk, pemasaran, manajemen keuangan dan kemasan.

“Pernah ikut mbak wah kalau itu sering diundang sama dinas, pelatihan gitu udah sering ikut, saya juga kan sudah lama dibidang usaha ini, jadi sering ikut-ikut acara pelatihan gitu mbak”¹³

Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro kota surabaya sering membuat pembinaan dengan mengundang berbagai pematari uuntuk menjelaskan tentang produk, pemasaran dll. Selain itu menurut penuturan bapak syuitno, Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro surabaya juga memberikan dorongan mengenai pengurusan perijinan.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suyitno selaku pelaku um tas dan dompet. Pada kamis, 2 april 2018, pukul 15.00 WIB

¹³ *Op.cit.* Wawancara pak suyitno

BAB V

HUBUNGAN STAKEHOLDER PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai penjabaran terkait tugas dan fungsinya pada bab sebelumnya. Bab keenam disini akan diuraikan mengenai hasil penelitian Hubungan Antar *Stakeholder* dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya. Kemudian peneliti menarik kesimpulan untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang terjalin ditinjau dari peran masing-masing aktor dalam menjalankan program pemberdayaan pelaku usaha mikro yang berfokus pada bidang *fashion* yakni tas dan dompet.

5.1 Hubungan Stakeholder dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya

Pelaksanaan program pemberdayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya menggunakan sistem pemberdayaan yang mana melibatkan peran pihak lain yaitu swasta dan masyarakat. sebuah program pemberdayaan yang dijalankan kemudian membentuk hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. dalam praktiknya, terjadilah negosiasi dan melibatkan kerjasama antar stakeholder agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan keterlibatan stakeholder pada pelaksanaan program pemberdayaan ini kemudian menjadi fenomena yang menarik dalam agenda program pemerintah. Fenomena ini kemudian diulas mendalam menggunakan teori pemberdayaan yang dibagi berdasarkan hubungan-hubungan yang terjalin sesuai indikator teori pemberdayaan yaitu

hubungan kemitraan, hubungan pembinaan, hubungan partisipatif dan hubungan koordinasi. Berikut penjelasannya.

5.1.1 Hubungan Kemitraan (Permodalan)

Hubungan kemitraan merupakan persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dari hasil negosiasi dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Proses dalam menjalin kemitraan tidaklah begitu rumit. Mengingat peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya menjadi jebatan bagi pelaku usaha mikro agar dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar.

Hubungan kemitraan ini dilakukan dengan PT. Pelindo Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara bergerak pada bidang jasa Kepelabuhanan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelindo dengan mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi. Disamping itu, Pelindo juga menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo diharapkan mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Hubungan yang terjalin antara Dinas Koperasi, pelaku usaha mikro dan PT. Pelindo yakni hubungan kemitraan. Disinilah peran dinkop sebagai *leading sector* yang memberikan arahan kepada masyarakatnya(pelaku usaha mikro) untuk kemudian diberikan fasilitasi permodalan.

“...dinkop disini hanya sebatas bagaimana pelaku usaha mikro itu bisa mendapat akses, akses permodalan, akses pemasaran, akses pameran, yang dilakukan dengan BUMN dan perbankan”¹

Dinas koperasi dan usaha mikro Kota Surabaya biasanya mengundang calon yang akan memberikan modal kepada pelaku usaha mikro dengan mendatangkan langsung seperti membuat acara sosialisasi kepada pelaku usaha mikro. Fasilitasi akses permodalan usaha merupakan bentuk fasilitasi yang dilakukan dengan tujuan membantu kesulitan dana yang biasanya sering dialami oleh pelaku usaha mikro. Kesulitan pendanaan ini berakibat terhadap perkembangan usaha mikro yang tersendat akibat kepemilikan dana yang minim. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berusaha untuk membantu dalam mengatasi masalah tersebut.

“....karena mereka tidak memiliki link kesana jadi kita disini yang menjadi kepanjangan tangan antara BUMN dan masyarakat pelaku usaha mikro itu, kita undang mereka maunya kemana, ada Telkom dan ada Pelindo, mungkin suatu saat PLN mbak. Nah dari setiap BUMN itu biasanya ada CSR untuk memberdayakan masyarakat”²

Dengan memberikan bantuan modal dari BUMN ataupun lembaga keuangan dapat membantu usaha mikro mengembangkan usahanya. Setelah mendapatkan pinjaman modal untuk membangun usahanya, pelaku usaha

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ike bidang kemitraan. Pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 13.00 WIB

² Ibid.

mikro tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, masih tetap dipantau oleh dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama berjalannya program kemitraan tersebut. Seperti ungkapan bapak yusdi selaku kepala bidang kemitraan sebagai berikut.

“....setelah usaha mikro mendapatkan bantuan pinjaman modal dari situ kita tetap memonitoring juga, tidak dibiarkan lepas begitu saja. Seperti setelah mendapat modal akan dilihat nanti omzetnya bagaimana, harapan kita dengan bertambah modal ya tambah baik”³

Dengan adanya bantuan modal diharapkan usaha mikro lebih giat dan semangat dalam menjalankan usahanya. Bentuk fasilitasi pendanaan ini biasanya dilakukan dengan acara seminar yang dihadiri oleh lembaga atau instansi tersebut. Setelah itu, pelaku usaha mikro dapat langsung menghubungi sendiri pihak lembaga/intansi yang bersangkutan untuk mendapatkan pinjaman modal. Disamping itu, tidak semua usaha mikro diikutsertakan dalam program kemitraan ini. hal itu sejalan dengan pemaparan bapak Yusdi sebagai berikut.

“....yang kita undang ajak bermitra itu bukan jenis usaha yang baru dijalankan loh ya tapi yang sudah sedikit eksis, minimal dia sudah berjualan satu tahun, kalo usahanya masih baru kita ga berani, jadi paling tidak minimal satu tahun berjalannya usaha tersebut”⁴

Berbicara mengenai kemitraan dengan Pelindo juga tak lepas dari apa dan bagaimana syarat dan ketentuan agar dapat menjadi salah satu

³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Yusdi. Pada tanggal 15 Februari 2018. Pukul 13.30 WIB

⁴ Ibid.

penerima modal bantuan. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan Pelindo 3 harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:⁵

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

5.1.2 Hubungan Pembinaan

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan pemberdayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalami pergeseran dinamika. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan usaha mikro tidak lagi hanya berfokus pada satu tempat dilakukannya pemberdayaan melainkan adanya pembagian bidang atau fokus terhadap kemajuan usaha mikro yang melibatkan beberapa aktor lain yang sama-sama mempunyai kepentingan dalam mengembangkan usaha mikro. Pada awalnya masyarakat pelaku usaha mikro hanyalah berdiri sendiri mencoba untuk membangun usahanya sendiri tanpa bantuan pemerintah, kemudian seiring perkembangannya usaha mikro memiliki keterlibatan dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan

⁵ Diakses dari <https://www.pelindo.co.id/masyarakat-lingkungan/pkbl> pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul 17.00 WIB

Usaha Mikro untuk membentuk suatu masyarakat yang memiliki kesadaran, semangat tinggi dalam membangun dan memperbaiki hidupnya melalui usaha mikro ini.

Berdasarkan kesadaran masyarakat itulah yang kemudian menggerakkan pemerintah untuk melakukan pembinaan insentif terhadap pelaku usaha mikro binaan dinkop Surabaya. Pembinaan atau pelatihan ini dilakukan antara Pemkot Surabaya melalui dinkop dengan salah satu narasumber yang sering diundang yaitu akademisi Ciputra dan Airlangga atas dasar rasa saling percaya untuk kemudian diberikan pemahaman tentang manajemen kewirausahaan. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengembangan usaha mikro, yaitu bimbingan teknis kewirausahaan.

Bimbingan Teknis Manajemen Kewirausahaan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mikro tentang bagaimana mengelola usaha dengan baik. Dalam bimbingan teknis pelaku usaha akan diajarkan pembuatan rencana bisnis, pengelolaan keuangan usaha, strategi produksi yang baik, mengatur Sumber Daya Manusia yang ada dan pemasaran produk. Bimbingan Teknis ini diadakan dalam bentuk seminar dengan menghadirkan narasumber yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Misalnya pelaku usaha yang sudah sukses, konsultan bisnis ataupun akademisi. Dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman diharapkan pelaku usaha mendapatkan pengetahuan yang baik dalam mengelola usahanya.

Dinas koperasi dan usaha mikro dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro tas dan dompet melalui beberapa kegiatan yang dijalankan, berikut ini penjelasannya.

a. Bimbingan Teknis Manajemen Kewirausahaan

Bimbingan Teknis Manajemen Kewirausahaan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mikro tentang bagaimana mengelola usaha dengan baik. Dalam bimbingan teknis pelaku usaha akan diajarkan pembuatan rencana bisnis, pengelolaan keuangan usaha, strategi produksi yang baik, mengatur Sumber Daya Manusia yang ada dan pemasaran produk.

Gambar 5.1
Suasana Bimbingan Teknis



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Bimbingan Teknis ini diadakan dalam bentuk seminar dengan menghadirkan narasumber yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Misalnya pelaku usaha yang sudah sukses, konsultan bisnis ataupun akademisi. Dengan mendatangkan Narasumber yang berpengalaman diharapkan pelaku usaha mendapatkan pengetahuan yang baik dalam mengelola usahanya.

b. Bimbingan Teknis Legalitas dan Standarisasi Usaha

Bimbingan Teknis legalitas dan standarisasi usaha yang merupakan kegiatan yang memberikan pengetahuan tentang pentingnya kepemilikan legalitas dan standarisasi usaha. Pada saat ini kepemilikan legalitas usaha sangat penting sebab terdapat aturan bagi usaha mikro untuk memiliki legalitas seperti SIUP, PIRT, TDP, MERK, Izin BPOM RI dan sertifikasi halal.

Dengan pelaksanaan bimbingan teknis ini diharapkan para pelaku usaha mikro dapat mengerti pentingnya kepemilikan legalitas dan standarisasi usaha serta tata cara pembuatan legalitas tersebut. Kegiatan tersebut pun juga menghadirkan sejumlah

narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, BPOM Jawa Timur, LPPOM MUI Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

c. Fasilitasi Akses Permodalan Usaha dengan Perbankan

Fasilitasi akses permodalan usaha merupakan bentuk fasilitasi yang dilakukan dengan tujuan membantu kesulitan dana yang biasanya sering dialami oleh pelaku usaha mikro. Kesulitan pendanaan ini berakibat terhadap perkembangan usaha mikro yang tersendat akibat kepemilikan dana yang minim. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berusaha untuk membantu dalam mengatasi masalah tersebut.

Lembaga-lembaga keuangan atau perusahaan yang membantu akses permodalan tersebut antara lain Bank Jatim, PT Telkom dan PT Pelindo. Bentuk fasilitasi biasanya dilakukan dengan acara seminar yang dihadiri oleh lembaga atau instansi tersebut. Setelah itu, pelaku usaha mikro dapat langsung menghubungi sendiri pihak lembaga/intansi yang bersangkutan untuk mendapatkan pinjaman modal.

d. Pendampingan Manajemen Usaha Tenaga Pendamping

Pendampingan manajemen usaha oleh tenaga pendamping merupakan langkah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk

menjamin bahwa setiap pelaku usaha mikro binaan melakukan manajemen usaha yang baik sesuai dengan bimbingan teknis yang telah dilakukan. Pendampingan teknis yang dilakukan oleh tenaga pendamping meliputi sebagai berikut. *Pertama*, pembukuan keuangan yaitu arus kas masuk dan keluar. Dalam jangka waktu tertentu tenaga pendamping akan mengecek pembukuan yang dilakukan oleh Pelaku usaha mikro. Tujuannya adalah terciptanya keuangan usaha mikro yang sehat yang tidak mencampuradukkan keuangan usaha dan rumah tangga sehingga dapat tercipta Usaha mikro yang baik.

Kedua, penggunaan pemasaran offline maupun online. Pemasaran offline dilakukan dengan metode menitipkan produk pada warung atau tempat perbelanjaan. Jangkauan pemasaran jika dengan metode ini biasanya hanya sekitar wilayah surabaya ataupun jawa timur saja. Metode kedua adalah dengan pemasaran online. Pemasaran online ini dilakukan rata-rata menggunakan fasilitas sejumlah media sosial seperti facebook dan whatsapp. Selain itu, dalam pemasaran online pelaku usaha mikro diarahkan untuk mengikuti kegiatan pahlawan ekonomi maupun pejuang muda untuk dapat lebih mendalami cara pemasaran, pembuatan produk, dan packaging. Dalam hal pemasaran dengan mengikuti kegiatan pahlawan ekonomi dan pejuang muda dapat dibantu untuk pelatihan

pemasaran yang baik serta akan dapat dipromosikan lewat website pahlawan ekonomi.

Ketiga, pengelolaan omset penjualan produk. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro mengelola omset yang telah diperoleh untuk selanjutnya digunakan sebagai modal pengembangan usaha. Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa biasanya Usaha mikro belum menerapkan pengelolaan keuangan yang baik yaitu dengan mencampuradukkan antara keuangan usaha dan rumah tangga.

Keempat, pengelolaan proses produksi. Dalam pengelolaan ini tenaga pendamping berusaha mengarahkan pelaku usaha mikro untuk dapat memproduksi dengan baik dan menarik. Namun, pendamping juga ikut untuk mengarahkan Pelaku usaha mikro untuk mengikuti pelatihan yang diadakan pada kegiatan Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda yang diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu di Kaza City Mall Surabaya. Dalam kegiatan tersebut pelaku usaha mikro dapat belajar cara memproduksi seperti pelatihan makanan, jahit, batik, dan pembuatan handycraft.

Kelima, pengurusan legalitas usaha. Kegiatan ini dilakukan dengan dilakukannya pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dalam pengurusan pembuatan legalitas usaha. Secara umum pengurusan legalitas ini dilakukan sendiri oleh pelaku usaha. Namun, peran dari pendamping adalah untuk mengarahkan dan

memberikan informasi terkait proses pengurusan legalitas. Beberapa legalitas yang harus diurus oleh pelaku usaha mikro meliputi SIUP, Izin BPOM RI, TDP, PIRT, Merk, dan sertifikasi halal. Pengurusan legalitas tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Berikut adalah penjelasan terkait pengurusan legalitas.

I. SIUP

SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan salah satu surat izin yang harus dimiliki oleh semua kategori usaha termasuk usaha mikro. kepemilikan SIUP ini menjadi penting karena merupakan bukti legalitas usaha dihadapan hukum. Pengurusan SIUP dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Berikut adalah syarat pembuatan SIUP.⁶

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- 2) Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;
- 3) Fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- 4) Surat Penunjukan Kepala Cabang (bagi Perusahaan Cabang);
- 5) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi Perusahaan Cabang);
- 6) Fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan (bagi Perusahaan Cabang);
- 7) Pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 8) Persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri.

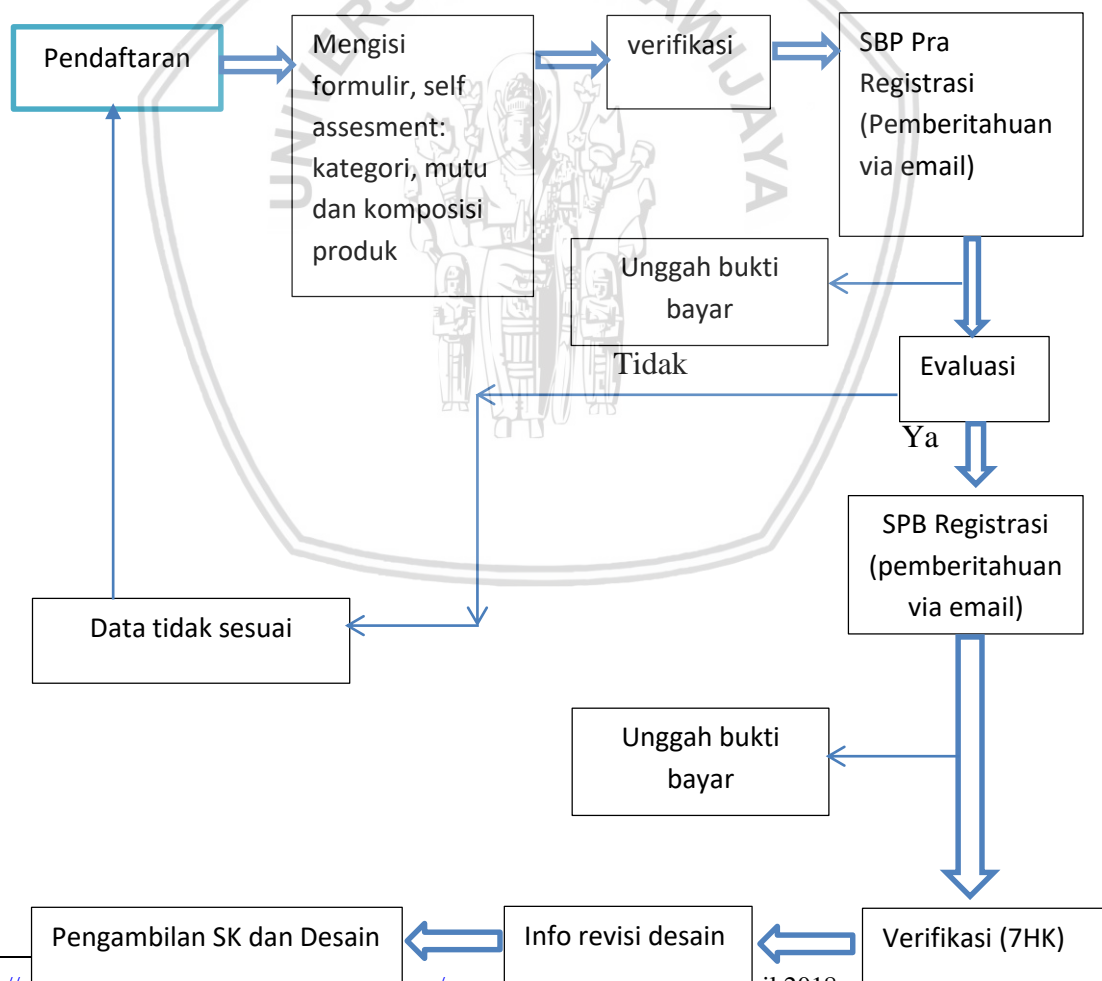
II. Izin BPOM

⁶ <http://disperdagin.surabaya.go.id/web/index.php/layanan/siup> diakses pada 19 April 2018 pukul 12.03 WIB

Izin BPOM merupakan izin tertinggi tentang izin peredaran makanan dan minuman di Indonesia. Untuk kategori usaha mikro yang memproduksi jenis jamu atau obat tradisional maka harus memiliki izin BPOM. Izin ini sangat berguna bagi pelaku usaha mikro terutama agar produknya dipercaya oleh konsumen. Tujuan akhirnya adalah produk tersebut dapat berdaya saing dan laku di pasaran. Berikut adalah alur prosedur pendaftaran produk di BPOM.⁷

Bagan 5.1

Alur Prosedur Pendaftaran produk di BPOM



⁷ <http://a...pan/prose> ril 2018 pukul 12.30 WIB

Sumber: Olahan Penulis, 2018

III. TDP

TDP atau Tanda Daftar Perusahaan merupakan salah satu surat yang perlu dilengkapi oleh usaha mikro. Pengurusan TDP ini pun juga dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya.

Berikut adalah syarat pengurusan TDP.⁸

- 1) Fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama atau Penanggungjawab, Komisaris, pemegang saham Perusahaan bagi WNI atau paspor bagi Orang Asing;
- 3) Fotocopy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;
- 4) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan/perorangan.
Surat Kuasa dan Foto Copy penerima kuasa (dilampirkan

apabila pengurusan ijin dilakukan oleh selain penanggung jawab perusahaan)

IV. PIRT

PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga merupakan salah satu izin yang harus dipenuhi oleh Pelaku usaha mikro. Izin ini merupakan izin mengenai standar keamanan makanan yang harus

⁸ <http://disperdagin.surabaya.go.id/web/index.php/layanan/tdp> diakses pada 19 April 2018 pukul 12:12 WIB

dipenuhi. Untuk mengurus izin tersebut dapat dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Berikut adalah alur perijinan PIRT.

Izin PIRT ini merupakan izin yang diperuntukkan bagi makanan atau minuman yang mempunyai daya tahan lebih dari tujuh hari. Izin ini khusus diberikan untuk makanan atau minuman olahan dengan tingkat resiko yang rendah. Berikut adalah alur pendaftaran perizinan termasuk PIRT di Dinas Kesehatan Kota Surabaya.⁹

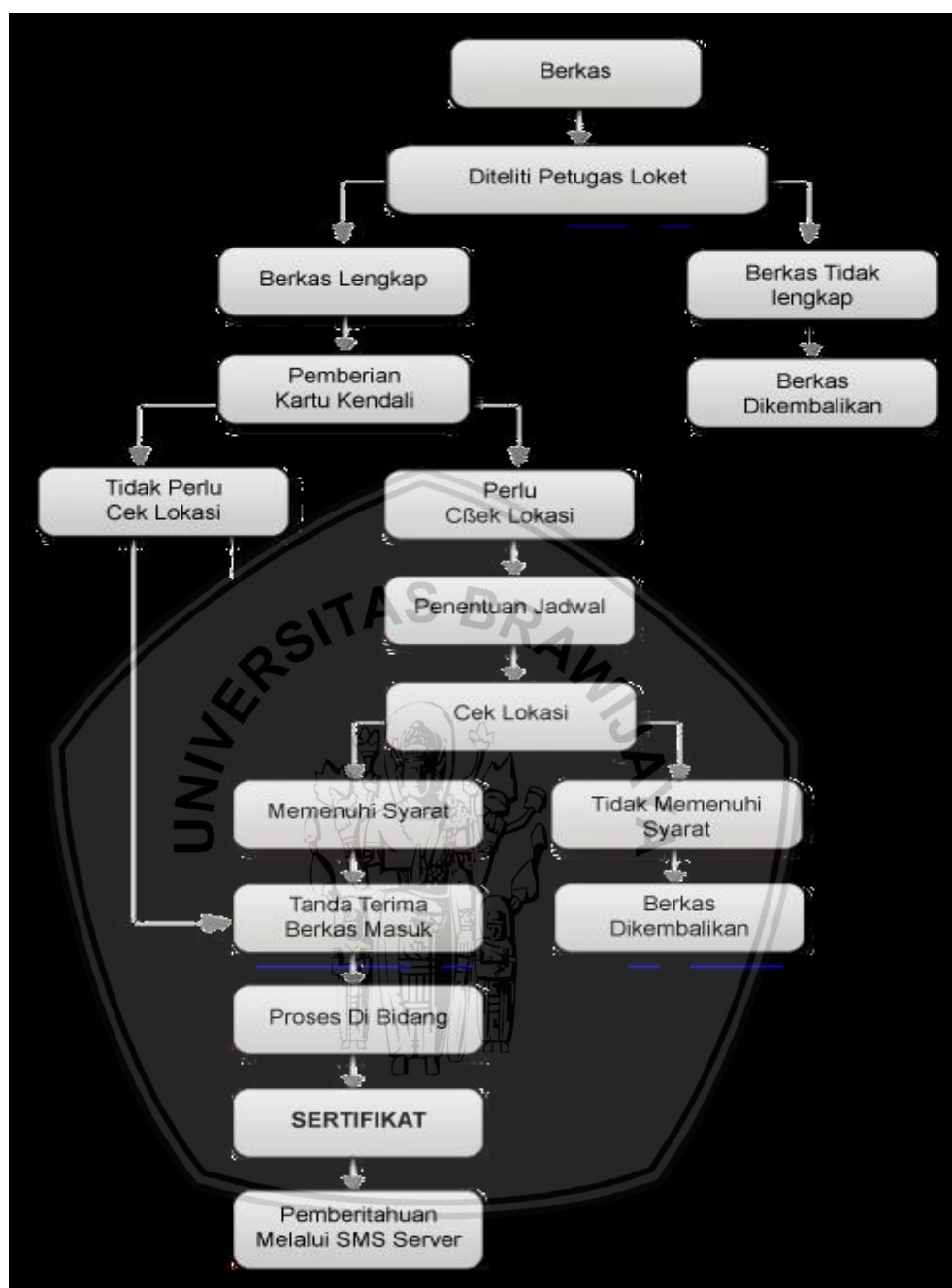


⁹ <http://dinkes.surabaya.go.id/portal/perijinan/> diakses pada 19 April 2018 pukul 12.55 WIB

Bagan 5.2

Alur Perijinan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya







V. Hak Kekayaan Intelektual Merk

Merk merupakan salah satu legalitas penting yang harus dimiliki oleh usaha mikro. Merk ini merupakan suatu label pembeda yang dimiliki oleh usaha mikro. Dalam hal ini pelaku usaha mikro yang ada di Jawa Timur termasuk Kota Surabaya mendaftarkan

merk kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Berikut adalah persyaratan permohonan hak merk.¹⁰

- 1) Mengajukan permohonan ke Kanwil secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan :
 - i. Foto copy KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
 - ii. Foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
 - iii. Foto copy peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);
 - iv. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
 - v. Tanda pembayaran biaya permohonan;
 - vi. 25 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, min. 2x2 cm);
 - vii. surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- 2) Mengisi formulir permohonan yang memuat :
 - i. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - ii. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - iii. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan;
 - iv. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
- 3) Membayar biaya permohonan pendaftaran merek.

VI. Sertifikasi Halal dan Label Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BPJPH atas fatwa yang dikeluarkan MUI untuk menjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman yang beredar di masyarakat indonesia. Menimbang bahwa penduduk indonesia merupakan

¹⁰ <http://jatim.kemenkumham.go.id/layanan-publik/hak-kekayaan-intelektual/persyaratan-hak-merk> diakses pada 19 April 2018 pukul 13:02 WIB

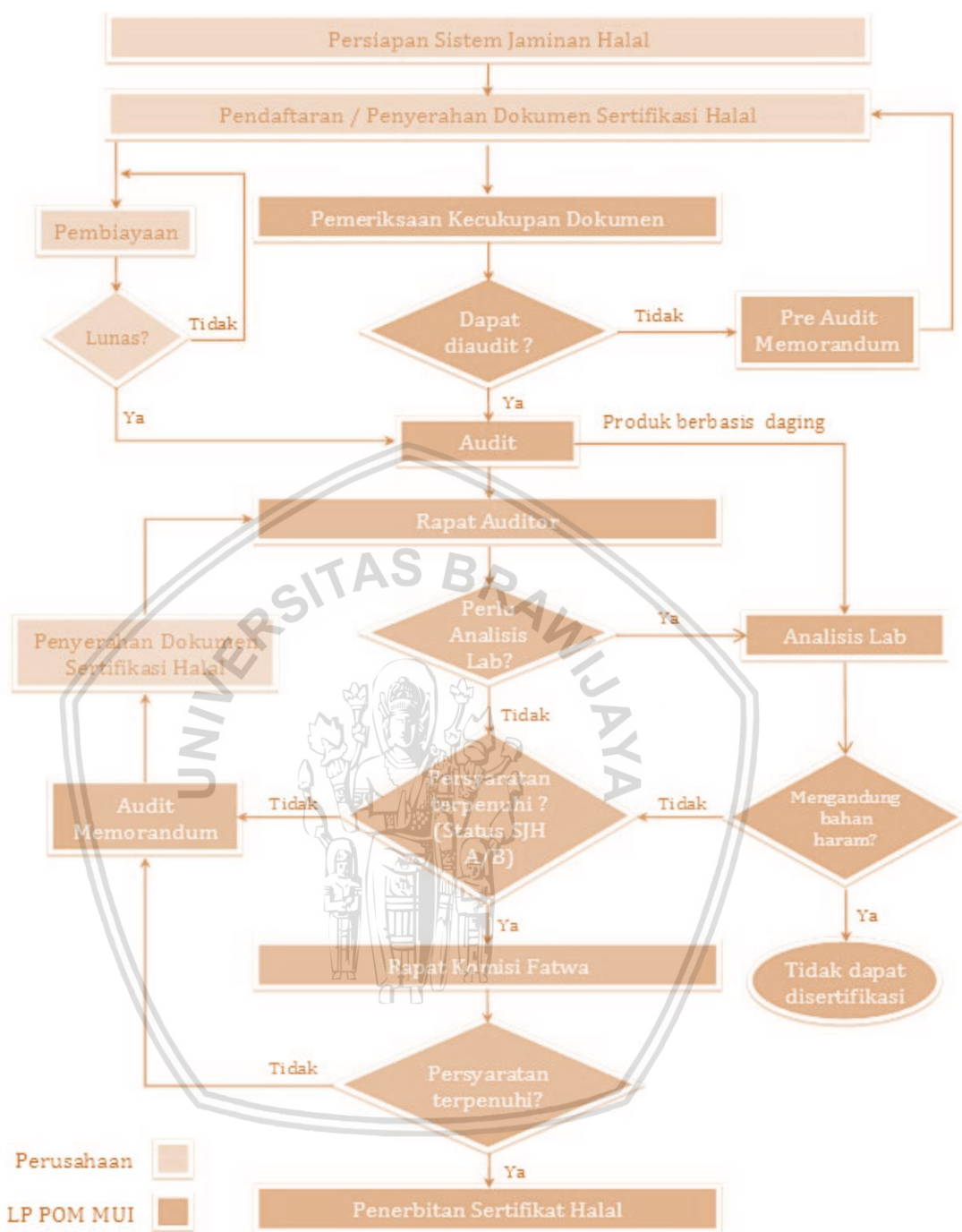
mayoritas muslim maka sangat penting sertifikasi halal. Berikut adalah alur sertifikasi halal.

Setelah sertifikasi halal didapatkan maka pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya ke BPOM untuk memperoleh label halal yang merupakan tanda kehalalan produk. Setelah produk ini didapatkan maka pelaku usaha mikro dapat mencantumkan label halal pada produknya. berikut ini alur pendaftaran sertifikasi halal.



Bagan 5.3
Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal¹¹

¹¹ http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1 diakses pada 19 April 2018 pukul 21.03 WIB





e. Fasilitas Promosi atau Pameran

Promosi dan pameran merupakan salah satu kegiatan untuk memperkenalkan produk ke konsumen. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk memperkenalkan produknya ke konsumen.

Fasilitasi ini sangat berguna dalam perluasan pasar usaha mikro yang ada di kota surabaya. Kegiatan promosi menjadi ajang yang ditunggu-tunggu para pelaku usaha mikro karena dengan kegiatan ini diharapkan dapat mendongkrak brand dari produk usaha mikro dan keuntungan di masa yang akan datang.

Apabila ditelaah lebih jauh hubungan pembinaan yang terjalin antara masyarakat pelaku usaha mikro dengan aktor akademisi yakni Ciputra dan Airlangga memiliki hubungan yang cenderung harmonis begitu juga antara aktor akademisi dan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Bagaimana tidak, berdasarkan pengamatan peneliti hubungan yang terjalin diantara ketiganya ialah hubungan yang saling mengayomi dan saling membutuhkan satu sama lain. Tentunya tak berbeda dengan hubungan yang terjalin dengan pihak lainnya. Akan tetapi dalam hubungan yang terjalin disini jelas bahwa bukan tidak mungkin masing-masing dari aktor yang berkontribusi pun memiliki kepentingan lain.

Kepentingan yang dimaksudkan seperti aktor Akademisi yaitu Ciputra dan Airlangga memang pada dasarnya dengan senang hati berkontribusi membantu pelaku usaha miko. Bukan dengan tanpa tujuan, jelas bahwa tujuan yang diinginkan oleh para aktor akademisi yaitu agar ilmu pengetahuannya dapat kemudian dipraktikkan oleh pelaku usaha mikro. Disamping itu, dengan

membantu pelaku usaha mikro, akademisi akan mendapat sebuah riset baru berdasarkan hasil pengamatannya lapangan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Hal tersebut sejalan dengan penuturan Stanislaus Adnanto yang menyatakan bahwa dalam memberikan materi atau saat diundang sebagai narasumber ke acara sosialisasi maupun bimtek, dari sini kemudian kami lakukan riset bersama terkait usaha mikro. Menjadi salah satu narasumber tentunya saat memberikan materi dari sana pula akan mendapatkan data terbaru mengenai perkembangan usaha mikro yang kemudian dijadikan hasil riset di perguruan tinggi.¹²

5.1.3 Hubungan Partisipatif

Hubungan partisipatif ini didasarkan atas partisipasi dari masyarakat (pelaku usaha mikro) itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi dan keinginan kuat dari masyarakat itu sendiri tidak akan berjalan pula program pemerintah. Untuk itu diperlukannya peran aktif masyarakat itu sendiri untuk membangun usahanya.

Gambar 5.2
Ramainya Partisipasi Pelaku Usaha Mikro

¹² Berdasarkan Wawancara dengan Stanislaus Adnanto selaku Akademisi Ciputra. Pada tanggal 15 Februari 2018. Pukul 14.50 WIB



Dengan adanya partisipasi dari masyarakat ini kemudian membentuk inisiatif untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha mikro. Peningkatan kualitas sumber daya mikro juga dilakukan dengan menambah motivasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan motivator untuk menambah semangat Pelaku usaha mikro. salah satu motivator yang dihadirkan adalah Ciputra.

Dalam praktiknya hubungan partisipasi yang terjalin diantara stakeholder didasari atas rasa saling percaya. Kepercayaan sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam menjalin

kerjasama dan agar seseorang itu mau berpartisipasi pun atas dasar kepercayaan. Rasa percaya inilah yang kemudian dibangun oleh masyarakat pelaku usaha mikro terhadap Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Sama halnya dengan aktor Akademisi dan Swasta yang turut berpartisipasi dalam melaksanakan program ini karena percaya dengan program yang sedang dijalankan Pemerintah dapat menyukseskan program tersebut. Pemerintah pun turut memberikan rasa percaya kepada aktor lainnya untuk kemudian bersama-sama menjalankan programnya. Terpilihnya Ciputra dan Universitas Airlangga pun juga atas dasar rasa percaya pemerintah yang dianggap kedua aktor akademisi ini mampu untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan sebagai bentuk kepedulian terhadap usaha mikro.

Apabila tidak terdapat rasa percaya didalamnya tidak mungkin ada yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan program pemberdayaan ini. Hal ini sejalan dengan penuturan bapak suyitno sebagai berikut.

“....iya mbak kalo semisal samean ga percaya sama orang gitu ga mungkin kan samean mau ikutin kemauannya gitu. Lah ini saya ikut semua kegiatan yang diadakan dinas Koperasi ya begitu karena saya percaya kalau usaha saya akan maju dengan dorongan dari dinkop.”¹³

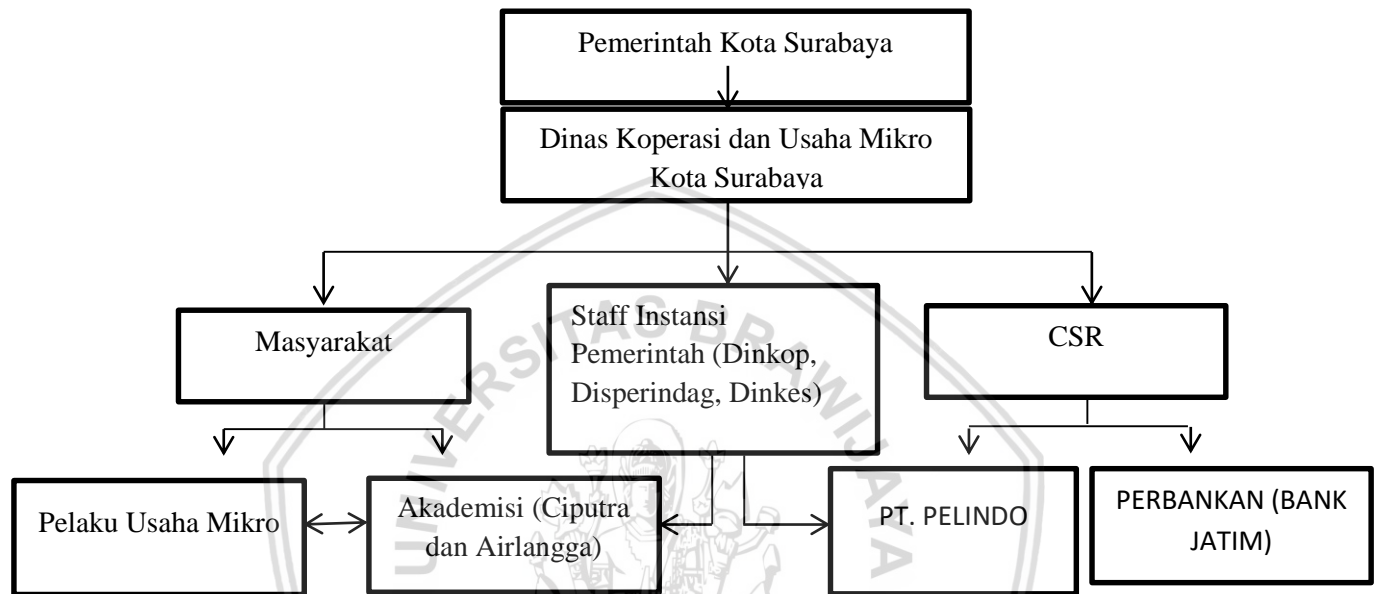
¹³ *Op.cit.* Wawancara pak suyitno

5.1.4 Hubungan Koordinasi

Koordinasi merupakan bagian terpenting yang tak lepas dari hubungan dalam pelaksanaan program yang melibatkan pihak lain. Hal ini dimaksudkan agar peran dari masing-masing aktor terlihat jelas. Pelaksanaan program pemberdayaan di Kota Surabaya memiliki aktor-aktor yang terlibat dan saling berkoordinasi menjalin kerjasama agar tujuan program tersebut dapat tercapai. Koordinasi yang baik dan tersusun dimaksudkan agar terciptanya komunikasi dari berbagai arah agar program dapat berjalan lancar.

Koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan program memiliki wewenang yang berbeda dikarenakan pemerintah tidak dapat menjalankan program ini berdiri sendiri karena peran pemerintah yang hanya sebatas fasilitator pelaksanaan kegiatan. Oleh karenanya, peran dari aktor swasta sangatlah penting dalam pelaksanaan sebagai donatur. Tanpa adanya keterlibatan swasta aka program tersebut juga tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut ini pola hubungan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro Kota Surabaya.

Bagan 5.4
Pola Hubungan Koordinasi Pemberdayaan



Sumber : Olahan Penulis, 2018

Berdasarkan bagan diatas dapat diketahui bahwa aktor-aktor yang terlibat daalam kerjasama saling koordinasi satu dengan yang lainnya. Pemerintah kota surabaya mengkoordinasikan program pemberdayaan usaha mikro kepada dinkop untuk kemudian dibina dan diberdayakan lebih lanjut. Setelah itu, dinkop melakukan pendataan kepada pelaku usaha mikro untuk kemudian bisa terdaftar sebagai binaan dinkop. Langkah awal yang diusung oleh dinkop adalah dengan melakukan pengecekan usaha mikro sesuai data yang sudah didapat oleh Dinas Koperasi dan usaha mikro. Pengecekann ini

dilakukan dengan survei langsung ke tempat usaha. Dalam survei tersebut akan dicek keberadaannya. Dalam artian dicek benar atau tidaknya keaktifan usaha dan keberadaan usaha mikro pada saat pengecekan. Pengecekan ini dilakukan oleh tenaga pendamping usaha.

Pada saat usaha mikro tersebut terbukti masih aktif atau keberadaannya masih ada maka akan dicatat dan akan dibina dibawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Setelah itu kemudian, upaya pemberdayaan masuk pada langkah berikutnya yaitu penilaian persyaratan produk usaha mikro. Penilaian persyaratan produk pelaku usaha mikro merupakan langkah pra intervensi. Dalam artian bahwa pada tahap ini adalah langkah sebelum benar-benar dibina melalui sejumlah program yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

Pada tahap ini pelaku usaha mikro yang telah terbukti masih aktif maka akan di survei kembali oleh tenaga pendamping tujuannya untuk penilaian persyaratan produk. Penilaian persyaratan produk tersebut meliputi kepemilikan berbagai legalitas usaha seperti SIUP, TDP, MERK, PIRT, Izin BPOM RI dan sertifikasi halal seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Selain itu juga akan dinilai bagaimana omset, tingkat pemasaran, dan *packaging* produk.

Setelah itu, maka dilakukan proses pembobotan atau penilaian terhadap produk pelaku usaha mikro. Data yang diperoleh

akan ditelaah dan dijadikan petunjuk upaya peningkatan daya saing pelaku usaha mikro tersebut. Dari data tersebut akan terlihat kelebihan apa yang dimiliki suatu usaha mikro sekaligus kekurangannya. Dalam hal ini, kekurangan menjadi target utama bagi pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan peningkatan daya saing.

Apabila pelaku usaha mikro yang telah melewati tahap-tahap tersebut dan telah masuk sebagai daftar binaan dibawah dinkop maka selanjutnya akan langsung dibina oleh staf yang ada pada dinkop. Pada saat dibina pelaku usaha mikro memiliki senggang waktu dalam 1 tahun. Maksudnya waktu 1 tahun itu dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro untuk mengembangkan produknya menjadi lebih baik, karena nantinya akan ditawarkan dengan pihak luar seperti perusahaan-perusahaan atau swasta, pengusaha serta masyarakat secara umum di wilayah Kota Surabaya.

Dinas koperasi dan usaha mikro selanjutnya menjalin hubungan dengan stakeholder yakni swasta dan masyarakat umum. Bagian kemitraan pada dinas koperasi mencari donatur dari CSR yaitu perbankan maupun perusahaan swasta. CSR dari perbankan yang berkontribusi dalam program pemberdayaan pelaku usaha mikro dari yaitu Bank Jatim dan CSR dari perusahaan yaitu PT. Pelindo sebagai penyalur dana. Sementara itu, untuk kerjasama

dnegan masyarakat yaitu masyarakat pelaku usaha mikro itu sendiri dengan akademisi ciputra.

Berdasarkan kerjasama tersebut kemudain pelaku usaha dapat deiberdayakan dengan baik. Pada awalnya pelaku usaha mikro dibina langsung melalui biimbingan teknis yang mendatangkan akademisi dari ciputra yang berkompeten pada bidang kewirausahaan. Semua pelaku usaha mikro yang dibawahh binaan dinop diikutsertakan dalam acara inii. Tidak hanya itu, beberapa produk dari pelaku usaha mikro yang hadir dalam aara tersebut dipajang produknya di meja yang khusus untuk masyarakat luar bisa melihat dan membelinya.

Gambar 5.3
Produk Usaha Mikro Tas dan Dompot



Sumber: Olahan Penulis, 2018

Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang didapat baik pelaku usaha mikro maupun dinas koperasi dan usaha mikro. Kendala yang dimaksudkan seperti kurangnya minat dari pelaku usaha itu sendiri untuk mengembangkan usahanya. Dalam artian masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak begitu aktif saat sudah terdaftar sebagai binaan dinkop. Kendala lainnya yang sering terjadi adalah pelaku usaha mikro sering mengganti jenis usahanya yang tidak relevan dengan usaha yang sebelumnya dijalani. Misal yang awalnya jenis usahanya tas dan dompet beralih menjadi jenis usaha makanan atau minuman.

Kendala yang dihadapi juga hadir di dinkop *pertama*, apabila pelaku usaha mikro mengganti jenis usahanya dan sebagainya jelas dinkop juga disini harus memikirkan bagaimana cara untuk merubah strategi pemasaran yang berbeda dari jenis usaha sebelumnya. *Kedua*, kendala yang dihadapi juga pada permintaan yang tinggi

akan binaan dinkop tetapi saat telah menjadi binaan dinkop banyak yang berhenti atau tidak lagi aktif dalam usahanya, sehingga dinkopp perlu merekap ulang daftar binaannya. *Ketiga*, pelaku usaha mikro terkadang pindah tempat tinggal dan mengganti nomor *handphone* tanpa ada konfirmasi lebih lanjut kepada dinkop sehingga cukup sulit untuk dihubungi dan berkoordinasi dengan dinas koperasi.

Disisi lain, adapun kendala dalam koordinasi yang terjadi dilapangan seperti pihak CSR yang terkadang mempunyai penilaian tersendiri untuk produk—produk yang ingin diberikan dana. Tetapi disini dinkop dan pelaku usaha mikro bersama-sama mengusahakan agar bisa mendapatkan suntikan dana dari pihak luar. Bank jatim dan juga PT. Pelindo berjalan lancar dikarenakan koordinasi yang mudah dilakukan. kontrol pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh dinas koperasi dan usaha mikro. Kendala pada praktik kegiatan program pemberdayaan hanya terdapat pada belum semuanya produk tas dan dompet yang mendapatkan donatur untuk usahanya.



BAB VI

PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang akan mengulas kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian tentang hubungan antar stakeholder dalam pemberdayaan usaha mikro di Kota Surabaya.

6.1 Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai hasil penelitian hubungan aktor dalam pemberdayaan usaha mikro kota surabaya. Pada bab keenam ini penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis sesuai dengan teori dan konsep yang ada. Maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan yang dijalankan dalam perbedayaan usaha mikro. *Pertama*, hubungan kemitraan dalam pelaksanaanya membentuk negosiasi dan kerjasama yang mengikat antara pemerintah, swasta, masyarakat. *Kedua*, hubungan partisipasi dibentuk dari kesadaran pelaku usaha mikro dalam ikut serta disetiap bazaar maupun pelatihan yang diadakan oleh astakeholder pemberdayaan. *Ketiga*, hubungan koordinasi terbentuk karena adanya koordinasi yang baik hubngan antar aktor berjalan dengan lancar. *Keempat*, hubungan pembinaan terbentuk dengan adanya rasa saling percaya antar stakeholder dalam memberdayaan pelaku usaha mikro.

6.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian mengenai hubungan aktor pemberdayaan pelaku usaha mikro tas dan dompet di Kota Surabaya penulis akan memberikan beberapa rekomendasi. Diharapkan melalui penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi sarana kritik yang membangun untuk kedepannya bagi masyarakat maupun pihak terkait.

1. Dalam hubungan pemberdayaan pelaku usaha mikro baik dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Surabaya agar lebih berperan aktif dalam mendukung perkembangan industri usaha mikro bidang fashion tas dan dompet.
2. Dalam perumusan kebijakan mengenai pengembangan pemberdayaan usaha mikro tas dan dompet diharapkan untuk melibatkan masyarakat pelaku usaha mikro tas dan dompet. Bidang fashion. Dengan demikian, mereka dapat menyampaikan aspirasi dan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran.
3. Masyarakat pelaku usaha mikro diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan informasi guna perkembangan usaha mereka menjadi lebih maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alif. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pusaka Belajar.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga.
- Lungan, Richard. 2006. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rukminto, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penulisan Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana.
- Teguh, Ambar Sulistiyani. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Betsy Setiono. 2012. “Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam Perolehan Hak Merek Bagi Usaha Kecil Menengah Inovatif”.

Bhargava, Vinay. 2012. “Strategies for Empowering Communities to Demand Good Governance and Seek Increased Effectiveness of Public Service Delivery”.

Croswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publication, Inc.

SKRIPSI

Adrianus Aman. 2010. “*Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Pada Pemerintahan Kota Malang)*”.

Muhammad Farid Said. 2015. “*Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rahman Perwiranto, 2011, “*Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Kota Kediri (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri)*”.

Suparno, Anggit dan Wiwit. 2013. *“Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok di Kudus”*.

Zulfa Ardaani, 2012, *“Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, kecil dan menengah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi di Kabupaten Tulungagung)”*.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Jumiati selaku staf bidang bina usaha produktif, bagian usaha mikro pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 11.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Agung selaku Staff pada bidang donatur Bank Jatim, pada 19 Maret 2018, 15:31 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rahma selaku Staff PT. PELINDO, pada 19 Maret 2018, 10:51 WIB.

Wawancara dengan Bapak Suyitno selaku pelaku um tas dan dompet. Pada Kamis, 2 april 2018, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ike bidang kemitraan. Pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Stanislaus Adnanto selaku Akademisi Ciputra. Pada tanggal 15 Februari 2018. Pukul 14.50 WIB

Wawancara dengan Pak Yusdi. Pada tanggal 15 Februari 2018. Pukul 13.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Sigit selaku Akademisi Airlangga. Pada tanggal 15 Februari 2018. Pukul 14.20 WIB

WEBSITE

<http://jatim.kemenkumham.go.id/layanan-publik/hak-kekayaanintelektual/persyaratan-hak-merk> diakses pada 19 April 2018 pukul 13:02

WIB

<http://asrot.pom.go.id/index.php/home/depan/prosedur> diakses pada 19 April 2018 pukul 12.30 WIB

<http://dinkes.surabaya.go.id/portal/perijinan/> diakses pada 19 April 2018 pukul 12.55 WIB

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1 diakses pada 19 April 2018 pukul 21.03 WIB

<http://disperdagin.surabaya.go.id/web/index.php/layanan/siup> diakses pada 19 April 2018 pukul 12.03 WIB

<http://disperdagin.surabaya.go.id/web/index.php/layanan/tdp> diakses pada 19 April 2018 pukul 12:12 WIB

Diakses pada <http://www.bankjatim.co.id> pada tanggal 11 April 2018. Pukul 18.35 WIB

Diakses dari <https://www.pelindo.co.id/masyarakat-lingkungan/pkbl> pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul 17.00 WIB

“Empowerment Definition”. Diakses dari <http://siteresources.worldbank.org> pada tanggal 21 Maret 2018

<http://www.dekop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/> diakses

pada 30 Juli 2017 pukul 17.10 WIB.

http://dispendukcapil.surabaya.go.id/stat_new/index.php diakses pada tanggal 21

Agustus 2017 pukul 10.21 WIB.

Publikasi Khusus

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Surabaya 2016-2021

